

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025 dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam menyediakan data dan informasi kependudukan yang benar, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah mewujudkan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pendayagunaannya untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini menegaskan bahwa data kependudukan memiliki peran yang sangat strategis, bukan sekadar catatan statistik, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pembangunan masyarakat.

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/8458/MD tanggal 20 Desember 2012. Penyajian data secara periodik dan sistematis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi, dinamika, serta prospek kependudukan di Kabupaten Sumba Timur, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kita menyadari bersama bahwa pembangunan yang efektif dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila didukung dengan ketersediaan data yang valid, lengkap, dan terkini. Data kependudukan menjadi dasar dalam merancang kebijakan publik, menetapkan sasaran program, serta mengukur capaian pembangunan. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur memiliki peran penting dalam menyediakan Satu Data Kependudukan yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Saya meyakini, kehadiran buku Profil Perkembangan Kependudukan Semester Pertama Tahun 2025 ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga kalangan akademisi. Data yang tersaji diharapkan dapat memperkuat sinergi, kolaborasi, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Lebih dari itu, buku ini juga menjadi salah satu pijakan penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumba Timur yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Dengan dukungan data kependudukan yang akurat, kita dapat mengidentifikasi potensi daerah, menjawab tantangan pembangunan, serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya optimis bahwa dengan kerja keras, kebersamaan, dan komitmen seluruh pihak, Kabupaten Sumba Timur dapat berkembang menjadi daerah yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur beserta pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku ini. Semoga Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025 dapat memberikan manfaat yang besar, menjadi referensi yang terpercaya, serta memberikan inspirasi bagi kita semua dalam membangun Sumba Timur yang lebih baik di masa depan.

Waingapu, 25 September 2025

BUPATI SUMBA TIMUR

UMBU LILI PEKUWALI, ST, M.T

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya, penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 269/Dispenduk.800/269/V/2025 tentang Penetapan Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025.

Proses pengolahan data dan informasi kependudukan yang disajikan dalam buku ini didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2025, yang telah melalui proses pembersihan dan konsolidasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai ketentuan, penyajian DKB dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 30 Juni untuk Semester Pertama dan pada tanggal 31 Desember untuk Semester Kedua. Data ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, serta upaya pencegahan tindak kriminal.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025 disusun berdasarkan data hasil registrasi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diperoleh melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Selain itu, data dalam buku ini juga dihimpun dari lintas sektor dan perangkat daerah terkait, sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.

Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sektor-sektor pembangunan daerah maupun pelaku pelayanan publik lainnya, sekaligus memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Lebih jauh, profil ini juga menyajikan gambaran mengenai kuantitas dan kualitas penduduk per wilayah kecamatan yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, serta indikator strategis lainnya. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian administrasi kependudukan yang lebih tertib, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, masukan, dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan publikasi ini pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh tim yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyuntingan, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Semester Pertama Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat nyata, menjadi referensi yang terpercaya, serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Sumba Timur.

Berbuat baiklah selagi kita diberi kesempatan, agar karya ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua.

TUHAN MEMBERKATI KITA SEMUA

Waingapu, 25 September 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Timur,

SAFRIYANTI INA DAPADEDA, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 197106201997032009

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	2
Pengertian Umum terhadap istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	5
Letak Geografis Daerah	5
Kondisi Demografis Daerah	7
Gambaran Ekonomi Daerah	8
Pertanian	9
Perikanan	9
Pertambangan	9
Pariwisata	10
Potensi Daerah	10
Bidang Kesehatan	10
Bidang transportasi	12
Bidang Pendidikan	12

BAB III SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN	15
A. Data Registrasi	15
B. Data yang berasal dari Lintas Sektor terkait.....	15
Dinas Kesehatan	15
Dinas Sosial	15
Dinas Pendidikan	15
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	16
BAPPEDA.....	16
Dinas Pariwisata	16
BPJS Kesehatan	16
Stasiun Meteorologi.....	16
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	17
A. Kuantitas Penduduk	17
a. Jumlah dan persebaran Penduduk	18
1. Jumlah dan persebaran penduduk menurut jenis kelamin per Kecamatan	18
2. Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)	20
3. Laju pertumbuhan Penduduk	21
b. Penduduk menurut Karakteristik Demografi	23
c. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	32
B. Kualitas Penduduk	48
1. Kesehatan.....	49
2. Pendidikan.....	56
3. Ekonomi	58
4. Sosial	63

C. Mobiltas Penduduk	67
BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	69
Kepemilikan Akta Kelahiran	69
Kepemilikan KIA	74
Kepemilikan Akta Perkawinan	76
Kepemilikan E-KTP	77
Kepemilikan Kartu Keluarga	78
Identitas Kependudukan Digital	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan	18
Tabel 2 - Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah	20
Tabel 3 - Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk	21
Tabel 4 - Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	24
Tabel 5 - Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kelompok Umur	27
Tabel 6 - Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan	28
Tabel 7 - Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif	31
Tabel 8 - Rasio Ketergantungan menurut jenis kelamin	31
Tabel 9 - Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	33
Tabel 10 - Jumlah penduduk menurut Agama dan Kepercayaan	34
Tabel 11 - Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan	35
Tabel 12 - Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Perkawinan	36
Tabel 13 - Jumlah Penduduk, Kepala keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga	40
Tabel 14 - Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga	41
Tabel 15 - Jumlah Proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 16 - Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	43
Tabel 17 - Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja dan Jenis Pekerjaan	44
Tabel 18 - Karakteristik Kepala Keluarga menurut tingkat Pendidikan	45
Tabel 19 - Angka Kelahiran Kasar	47
Tabel 20 - Rasio Anak dan Perempuan (CWR)	49
Tabel 21 - Jumlah penduduk menurut golongan darah	51

Tabel 22 - Angka Kematian Neonatal (NDDR) dan Post Neo Natal	54
Tabel 23 - Angka Kematian Balita	55
Tabel 24 - Angka Putus Sekolah (APS).....	56
Tabel 25 - Angka Partisipasi Kasar (APK)	57
Tabel 26 - Angka Partisipasi Murni (APM)	58
Tabel 27 - Jumlah Penduduk menurut Kelompok Pekerjaan	59
Tabel 28 - Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	62
Tabel 29 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 Tahun	70
Tabel 30 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun	71
Tabel 31 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Umum	73
Tabel 32 - Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	75
Tabel 33 - Kepemilikan Akta Perkawinan	76
Tabel 34 - Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – EL)	78
Tabel 35 - Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	79
Tabel 36 - Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses berkelanjutan dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam maupun kemajuan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada faktor kependudukan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga data dan informasi kependudukan yang akurat menjadi kebutuhan mendasar dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan.

Pembangunan yang berorientasi kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, karakteristik, serta dinamika penduduk pada suatu wilayah. Ketersediaan data kependudukan yang mutakhir di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan. Tanpa memperhatikan faktor kependudukan, pembangunan dapat menghadapi tantangan serius karena setiap pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

Dalam konteks ini, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berperan strategis sebagai sumber utama penyediaan data kependudukan yang valid, mencakup jumlah penduduk, struktur, komposisi, serta persebarannya. Data tersebut wajib digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perencanaan pembangunan.

Salah satu bentuk pemanfaatan data kependudukan dari pengelolaan administrasi kependudukan adalah penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010, profil ini memuat gambaran kondisi, perkembangan, serta prospek kependudukan di suatu daerah. Penyusunannya bersumber dari data registrasi kependudukan yang dihasilkan melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis SIAK, serta data lintas sektor yang dihimpun dari berbagai instansi terkait.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengelola data kependudukan yang dapat mencerminkan kondisi riil

masyarakat di daerah. Hal ini sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menekankan pentingnya ketersediaan Satu Data Kependudukan di seluruh wilayah administrasi.

Lebih jauh, perkembangan kependudukan dengan segala dimensi dan implikasinya harus menjadi prioritas penting agar dapat tercapai keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Penduduk juga memiliki kewajiban untuk memberikan data yang benar terkait dirinya maupun keluarganya, termasuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami, sepanjang tidak melanggar hak-hak dasar sebagai warga negara.

Oleh karena itu, diharapkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Semester Pertama Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 dapat menyajikan data yang valid, akurat, dan terpercaya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Penyajian informasi yang dikemas secara sederhana, komunikatif, informatif, serta tepat waktu diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi, karakteristik, dan prospek kependudukan di Kabupaten Sumba Timur, sekaligus menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

B. Tujuan

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
2. Menyediakan sarana publikasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

C. Ruang Lingkup

1. **Pendahuluan:** Berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, serta pengertian umum terkait istilah-istilah yang digunakan dalam profil kependudukan.
2. **Gambaran Umum Daerah:** Memuat informasi tentang letak geografis, kondisi demografis, gambaran ekonomi, serta potensi daerah.
3. **Sumber Data:** Bersumber dari data registrasi kependudukan melalui SIAK Semester Pertama Tahun 2025 (Data Konsolidasi Bersih/DKB) serta data lintas sektor yang relevan.

4. **Perkembangan Kependudukan:** Mencakup dimensi kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.
5. **Kepemilikan Dokumen Kependudukan:** Data mengenai kepemilikan dokumen seperti KK, KTP-el, akta-akta pencatatan sipil, KIA, SKPWNI, dan Identitas Kependudukan Digital.
6. **Kesimpulan:** Menggambarkan permasalahan kependudukan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi kebijakan.

D. Pengertian Umum

1. **Penduduk:** Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Kependudukan:** Segala hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kematian, kehamilan, persebaran, mobilitas, dan kualitas penduduk.
3. **Perkembangan Kependudukan:** Perubahan kondisi kependudukan yang dapat dipengaruhi maupun mempengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
4. **Administrasi Kependudukan:** Rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pemanfaatannya.
5. **Data Kependudukan:** Data perorangan maupun agregat sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. **Kuantitas Penduduk:** Jumlah penduduk akibat perbedaan kelahiran, kematian, dan perpindahan.
7. **Kualitas Penduduk:** Kondisi penduduk mencakup aspek fisik dan non-fisik, seperti kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan ketahanan sosial budaya.
8. **Mobilitas Penduduk:** Gerak perpindahan penduduk melewati batas administrasi wilayah.
9. **Profil Perkembangan Penduduk:** Kumpulan data dan informasi tertulis tentang kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan.
10. **Persebaran Penduduk:** Sebaran penduduk secara keruangan di suatu wilayah.
11. **Peristiwa Kependudukan:** Kejadian yang dialami penduduk dan wajib dilaporkan karena berdampak pada dokumen kependudukan.
12. **Peristiwa Penting:** Kejadian seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.
13. **Kelahiran/Fertilitas:** Komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk.
14. **Anak Lahir Hidup:** Bayi yang menunjukkan tanda kehidupan saat dilahirkan.
15. **Angka Kelahiran Total (TFR):** Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya.

16. **Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR):** Jumlah kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu.
17. **Angka Kelahiran Kasar (CBR):** Jumlah kelahiran per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun.
18. **Kematian/Mortalitas:** Hilangnya seluruh tanda-tanda kehidupan secara permanen.
19. **Angka Kematian Bayi Baru Lahir:** Jumlah kematian bayi usia 0–28 hari per 1.000 kelahiran hidup.
20. **Angka Kematian Bayi (IMR):** Jumlah kematian bayi usia <1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.
21. **Angka Kematian Kasar (CDR):** Jumlah kematian per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun.
22. **Rasio Jenis Kelamin:** Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan.
23. **Umur Median:** Usia yang membagi penduduk menjadi dua bagian sama besar.
24. **Mobilitas Penduduk:** Gerak perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain.
25. **Migrasi Permanen:** Perpindahan penduduk dengan tujuan menetap melewati batas administrasi.
26. **Mobilitas Non Permanen (Sirkuler):** Perpindahan penduduk tanpa tujuan menetap.
27. **Tenaga Kerja:** Penduduk usia 15–64 tahun yang dapat memproduksi barang dan jasa.
28. **Penduduk Usia Kerja:** Penduduk berusia 15–64 tahun.
29. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):** Proporsi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.
30. **Penduduk Usia Produktif:** Penduduk berusia 15–64 tahun.
31. **Penduduk Usia Non Produktif:** Penduduk berusia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas.
32. **Pengangguran:** Penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
33. **Angka Pengangguran:** Proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
34. **Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio):** Perbandingan jumlah usia non produktif terhadap usia produktif.
35. **Rasio Kepadatan Penduduk:** Perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah.
36. **Child Women Ratio (CWR):** Jumlah anak perempuan usia <5 tahun per 100 perempuan usia 15–49 tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Letak Geografis Daerah

Kota Waingapu merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sumba Timur yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan sebesar 7.000,5 km² atau sekitar 700.050 hektar, serta wilayah laut seluas 8.373,53 km² dengan panjang garis pantai mencapai 433,6 km. Secara administratif, Kabupaten Sumba Timur terdiri atas 22 kecamatan dan 156 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Waingapu.

Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur terletak pada koordinat 119°45' – 120°52' Bujur Timur (BT) dan 9°16' – 10°20' Lintang Selatan (LS), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Sumba
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sabu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah

Topografi wilayah Kabupaten Sumba Timur cukup bervariasi. Sekitar 40% dari total luas wilayah merupakan daerah berbukit terjal, khususnya di bagian selatan, dengan lereng-lereng yang relatif subur dan potensial untuk pengembangan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Wilayah utara dan tengah didominasi oleh dataran rendah serta padang sabana yang luas, yang menjadi ciri khas Pulau Sumba. Kondisi geografis ini menjadikan Sumba Timur memiliki kekayaan alam yang unik sekaligus tantangan tersendiri dalam pengelolaan tata ruang dan pembangunan wilayah.

Dari sisi iklim, Kabupaten Sumba Timur beriklim tropis dengan dua musim yang jelas, yaitu musim kemarau yang berlangsung cukup panjang dan musim penghujan yang relatif singkat. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Umu Meheng Kunda 30 Juni 2025, suhu udara rata-rata tahunan adalah 26,6°C, dengan suhu terendah 20,4°C dan suhu tertinggi mencapai 33,5°C. Kelembaban udara rata-rata tercatat 77%, dengan kelembaban terendah 40% dan tertinggi 98%. Curah hujan rata-rata adalah 6 mm per bulan dengan rata-rata 5 hari hujan, sementara intensitas penyinaran matahari mencapai 65%. Kondisi iklim ini sangat berpengaruh terhadap pola tanam, ketersediaan air, serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

Selain potensi pertanian, letak geografis Sumba Timur dengan garis pantai yang panjang juga memberikan peluang besar di sektor kelautan dan perikanan. Wilayah pesisir memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya laut, serta pengembangan pariwisata bahari. Potensi ini diperkuat dengan keberadaan beberapa pelabuhan rakyat dan pelabuhan feri yang mendukung konektivitas antar pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kondisi sosial budaya masyarakat Sumba Timur tidak terlepas dari pengaruh letak geografisnya. Mayoritas penduduk berasal dari Suku Sumba, dengan kehadiran suku-suku lain seperti Suku Sabu dan berbagai suku dari wilayah Nusantara. Kehidupan masyarakat ditandai dengan semangat gotong royong, toleransi, serta kuatnya pengaruh adat istiadat yang masih terjaga hingga kini. Letak geografis yang relatif terpencil dibandingkan pusat-pusat urban besar di Indonesia menjadikan masyarakat Sumba Timur tetap memegang erat tradisi, sekaligus terbuka terhadap modernisasi pembangunan.

Secara strategis, letak geografis Kabupaten Sumba Timur menempatkannya sebagai salah satu daerah penting di kawasan timur Indonesia. Posisi ini membuat Sumba Timur berperan sebagai pintu masuk menuju wilayah Pulau Sumba, baik dari sisi transportasi laut maupun udara. Bandar Udara Umu Meheng Kunda dan Pelabuhan Waingapu merupakan simpul transportasi utama yang menghubungkan Sumba Timur dengan wilayah lain di Nusa Tenggara Timur maupun dengan provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Sumba Timur memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi, perdagangan, pariwisata, serta dalam konteks pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan.

Dengan demikian, letak geografis Kabupaten Sumba Timur tidak hanya menggambarkan posisi fisik di peta, tetapi juga menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi alam, potensi sumber daya, serta peran strategis wilayah dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Pemanfaatan yang bijak terhadap potensi geografis diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Sumba Timur yang berkelanjutan.

B. Kondisi Demografis Daerah

Kondisi demografis suatu daerah merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika pembangunan, karena berkaitan langsung dengan jumlah, struktur, distribusi, serta perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Unsur-unsur demografi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas),

kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi), yang secara keseluruhan menentukan pertumbuhan dan perkembangan kependudukan.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2025 per 30 Juni 2025, jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur tercatat 279.158 jiwa, terdiri dari 142.901 jiwa laki-laki (51,2%) dan 136.257 jiwa perempuan (48,8%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada DKB Semester Kedua Tahun 2024 per 31 Desember 2024, terjadi penambahan 1.868 jiwa atau meningkat sekitar 1,45% dalam kurun waktu enam bulan. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup stabil dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, khususnya di sektor pelayanan dasar.

Secara administratif, jumlah penduduk tersebut tersebar di 22 kecamatan dan 156 desa/kelurahan dengan luas wilayah daratan sebesar 7.000,5 Km². Dengan demikian, kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Sumba Timur mencapai 38 jiwa/Km². Angka ini menunjukkan bahwa secara umum Sumba Timur masih tergolong daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, jika dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun secara nasional.

Distribusi penduduk di Kabupaten Sumba Timur tidak merata. Konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di wilayah perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kecamatan Kota Waingapu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 37.201 jiwa, dengan luas wilayah 73,8 Km², sehingga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lain. Kecamatan ini sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya adalah Kecamatan Kambera dengan 36.427 jiwa, dan Kecamatan Umalulu dengan 20.440 jiwa. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kambata Mapambuhang dengan 4.509 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 412,7 Km², sehingga kepadatan penduduknya tergolong sangat rendah. Ketimpangan distribusi ini memberikan implikasi pada perencanaan pelayanan publik, di mana daerah-daerah padat memerlukan perhatian lebih pada fasilitas infrastruktur, sementara daerah dengan penduduk jarang menghadapi tantangan dalam hal pemerataan layanan dasar.

Secara struktural, penduduk Kabupaten Sumba Timur didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini memberikan potensi positif

berupa bonus demografi, yaitu peluang bagi daerah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui optimalisasi tenaga kerja. Namun demikian, jika tidak dikelola dengan baik, tingginya jumlah usia produktif juga dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran dan urbanisasi ke wilayah perkotaan.

Selain itu, dinamika demografi di Kabupaten Sumba Timur juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Perpindahan penduduk ini umumnya terjadi karena alasan pendidikan, pekerjaan, maupun perkawinan. Wilayah perkotaan seperti Kota Waingapu dan Kampera menjadi tujuan utama migrasi karena ketersediaan fasilitas dan lapangan kerja yang relatif lebih banyak dibandingkan wilayah lain.

Dengan demikian, kondisi demografis Kabupaten Sumba Timur menggambarkan adanya pertumbuhan penduduk yang stabil, distribusi penduduk yang tidak merata, serta struktur penduduk yang berpotensi mendukung pembangunan daerah jika dikelola dengan tepat. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan, khususnya dalam bidang pelayanan dasar, penyediaan lapangan kerja, serta pemerataan infrastruktur antar wilayah.

C. Gambaran Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola potensi sumber daya yang ada dan membangun pola kemitraan dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, melainkan juga pada upaya pemerataan hasil pembangunan dan penguatan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, maupun pariwisata. Potensi tersebut apabila dikelola secara optimal akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesejahteraan masyarakat, serta kemandirian ekonomi daerah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya teknologi pengolahan, serta tingkat sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan.

Adapun sektor-sektor utama yang termasuk dalam potensi ekonomi daerah Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut:

1. Pertanian

Perekonomian Kabupaten Sumba Timur pada dasarnya bercorak agraris, dengan sektor pertanian masih menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Hal ini didukung oleh kondisi geografis dan ketersediaan lahan pertanian yang luas. Komoditas tanaman pangan yang dominan dihasilkan meliputi padi, jagung, sorgum, ubi-ubian, dan kacang tanah. Selain itu, sektor peternakan juga memiliki peranan penting, dengan komoditas unggulan berupa sapi, kambing, dan kuda yang tidak hanya menjadi aset ekonomi tetapi juga memiliki nilai budaya dan sosial bagi masyarakat Sumba.

Sektor pertanian diharapkan terus berkembang dengan adanya program modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta dukungan kebijakan pemerintah melalui penyediaan sarana produksi pertanian, bibit unggul, dan akses pasar yang lebih luas.

2. Perikanan

Dengan garis pantai yang panjang, Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar. Aktivitas nelayan tradisional yang sudah berlangsung sejak lama kini mulai didukung dengan adanya metode penangkapan modern serta potensi budidaya ikan yang dapat dikembangkan di berbagai wilayah pesisir.

Potensi ini menjadi salah satu sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pesisir, baik melalui kegiatan penangkapan maupun pengolahan hasil laut. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk perikanan Sumba Timur di pasar lokal maupun regional.

3. Pertambangan

Kabupaten Sumba Timur juga menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama di sektor pertambangan. Beberapa komoditas yang telah teridentifikasi antara lain emas di Desa Wanggameti Kecamatan Matawai La Pawu, serta potensi mangan dan batu bara di wilayah tertentu.

Apabila dikelola dengan baik, sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan PAD dan memperluas kesempatan kerja. Namun, pengelolaannya harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, tata ruang wilayah, serta kesejahteraan masyarakat sekitar agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Sumba Timur. Dengan kekayaan keindahan alam berupa pantai-pantai eksotis,

padang savana yang luas, serta budaya lokal yang unik, Sumba Timur telah menjadi salah satu destinasi wisata yang semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pariwisata didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman, kebahagiaan, serta kepuasan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013–2033.

Selain itu, untuk menjamin pengembangan potensi pariwisata sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya, pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 92/DISPARBUD.556.1/292/II/2022 tentang Penetapan Obyek Wisata dan Lokasinya di Kabupaten Sumba Timur. Dalam keputusan tersebut, obyek wisata dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi utama, yaitu:

- a. Obyek Wisata Klasifikasi Maju, yakni obyek wisata yang sudah dikenal luas, memiliki fasilitas yang relatif memadai, dan sering dikunjungi wisatawan.
- b. Obyek Wisata Klasifikasi Berkembang, yaitu obyek wisata yang sudah mulai dikenal masyarakat namun masih memerlukan pembangunan infrastruktur dan promosi agar lebih menarik minat pengunjung.
- c. Obyek Wisata Klasifikasi Rintisan, yaitu obyek wisata baru yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari segi keindahan alam maupun daya tarik budaya lokal.

Dengan berbagai potensi tersebut, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Sumba Timur di kancah nasional maupun internasional.

D. Potensi Daerah

1. Bidang Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang kesehatan sangat berperan dalam memacu peningkatan pendidikan masyarakat yang akan melahirkan masyarakat yang berkualitas dan siap membangun daerah menuju sejahtera serta dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa indikator kesehatan secara umum yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan adalah angka harapan hidup, angka

kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, masalah stunting dan gizi buruk.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur keadaan Semester Pertama Tahun 2025, sarana prasarana yang tersedia adalah : terdapat 5 (lima) buah rumah sakit yakni 3 (tiga) buah Rumah Sakit milik Pemerintah yaitu RSUD Umu Rara Meha, Rumah Sakit Umum Daerah Imanuel dan RS Nggongi, dan 2 (dua) buah Rumah sakit milik swasta yaitu Rumah Sakit Kristen Lindimara dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mitra Ananda dan, 4 (empat) buah Klinik yaitu Klinik Pratama Larisa, Klinik Caesar Medika, Klinik Pratama Grahosada dan yang semuanya berada di Kota Waingapu hanya Rumah Sakit Nggongi yang berada pada Kecamatan Karera. Puskesmas Pembantu ada 80 buah yang tersebar di 22 Kecamatan, Puskesmas dengan ruang bersalin ada 24 buah yang tersebar di 22 kecamatan, 67 Polindes yang tersebar di 22 kecamatan, 591 Posyandu, 13 Rumah Tunggu di 13 kecamatan, 79 Desa Siaga dan 26 Apotik, Toko Obat 5 buah dan 40 buah ambulans. Ada 3 Optikal yaitu Optikal Bandung, Optikal Jaya dan Optikal Internasional sedangkan yang mempunyai hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah Optikal Internasional. Disamping pelayanan umum kesehatan tersedia juga Asuransi Kesehatan yakni Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain sarana dan prasarana, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Pemerintah juga menyiapkan Sumber Daya Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan sebanyak 2.203 orang yang ditempatkan di Kecamatan-kecamatan, yang terdiri dari : 26 orang Dokter Ahli, 68 orang Dokter Umum, 3 orang Dokter PTT, 6 orang Dokter Gigi, 1.170 orang Perawat (Nurse), 19 orang Perawat Gigi, 521 orang Bidan, 74 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, 66 orang Tenaga Gizi, 61 orang Tenaga Analis, 50 orang Tenaga Farmasi Asisten Apoteker, 27 orang Tenaga Farmasi Apoteker, 56 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan, 56 orang Tenaga Sanitasi.

2. Bidang transportasi

Sistem transportasi darat melalui jalan raya dihubungkan dengan 3 (tiga) buah terminal yaitu terminal Kawangu, terminal Matawai yang berfungsi sebagai pelayanan antar kota dan terminal KM 4 yang berfungsi untuk melayani masyarakat antar Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Kabupaten Sumba Timur juga memiliki 3 (tiga) transportasi laut yakni Pelabuhan Nanga Mesi yang berfungsi sebagai pelayanan antar pulau dan merupakan satu-satunya pelabuhan ekspor-import, Pelabuhan Rakyat (PELRA) dan Pelabuhan Feri Nusantara Kanatang yang berada di Desa Kuta Kecamatan Kanatang yang berfungsi melayani penumpang antar pulau dalam Provinsi NTT yang difasilitasi oleh PT. PELNI Waingapu dan PT. ASDP Waingapu.

Disamping itu juga memiliki pelabuhan udara yakni Bandar Udara Umu Meheng Kunda, yang dapat didarati oleh pesawat dengan rute penerbangan antar daerah dalam dan luar Provinsi NTT.

3. Bidang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan. Kewenangan di Pusat akan dikurangi dan kewenangan di Daerah akan diperbesar. Berdasarkan UU tersebut maka urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta pendidikan dasar (SD) dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dengan adanya pengalihan kewenangan ini diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota lebih fokus membenahi pendidikan dasar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa dapat tercapai. Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya sejak Tahun Anggaran 2023 yang mana Bidang Pendidikan termasuk salah satu dari 3 (tiga) Bidang selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum yang memperoleh dana Specific Grant yang dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sumba Timur, adapun sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini PAUD dan Pendidikan Dasar (SD/SMP) dan juga SLTA yang merupakan kewenangan provinsi yang ada di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut :

PAUD/Kelompok Bermain(KB) Negeri sebanyak 292 sekolah Negeri,TK Negeri sebanyak 57 sekolah, SD ada 263 sekolah (Negeri 198 sekolah, Swasta 65 sekolah), Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 7 sekolah (Negeri 3 sekolah, Swasta 4 sekolah), SLTP sebanyak 77 sekolah (Negeri 69 sekolah, Swasta 8 sekolah), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 4 sekolah (Negeri 1 sekolah, Swasta 3 sekolah).

Untuk Tingkat SLTA : Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 1 sekolah, SLTA sebanyak 24 sekolah dan SMKN sebanyak 9 sekolah. SLTA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain sekolah, Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 4 (empat) buah Universitas Swasta yakni Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Akademi Keperawatan, Sekolah Tinggi Theologia Lewa dan Sekolah Tinggi Theologia Terpadu.

Adapun jumlah Tenaga Guru di Kabupaten Sumba Timur keadaan Semester Pertama 2025 sebanyak **4.257** orang, yang terdiri dari :

1. Tenaga Guru berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tenaga Guru ASN (PNS) sebanyak 1.329 orang berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu :

S2	: Guru SD	2 orang
	: Guru SMP	2 orang
S1	: Guru TK / PAUD	98 orang
	: Guru SD	638 orang
	: Guru Madrasah Itbidaiyah	77 orang
	: Guru SMP	306 orang
	: Guru Madrasah Tsanawiyah	11 orang
D3	: Guru SD	2 orang
	: Guru SMP	3 orang
D2	: Guru SD	37 orang
	: Guru SMP	4 orang
D1	: Guru SD	1 orang
SLTA	: Guru TK / PAUD	5 Orang
	: Guru SD	112 Orang
	: Guru Madrasah Tsanawiyah	31 Orang

2. Tenaga Guru ASN (PNS dan P3K) berdasarkan Jenis Kelamin :

a. Tenaga Guru P3K sebanyak 1.356 orang berdasarkan Jenis Kelamin yaitu:

Jenis Kelamin	TK	SD	Mad. Itbidaiyah	SMP	Mad. Tsanawiyah
Laki-laki	0	163	2	189	1
Perempuan	11	622	8	356	4
Jumlah	11	785	10	545	5

b. Tenaga Guru PTT sebanyak 1.572 orang berdasarkan Jenis Kelamin :

Jenis Kelamin	PAUD	TK	SD	Mad. Itbidaiyah	SMP	Mad. Tsanawiyah
Laki-laki	28	103	149	2	72	4
Perempuan	478	0	562	8	161	5
Jumlah	506	103	711	10	233	9

BAB III

SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari sebuah pengamatan (observasi) berupa angka, lambang ataupun sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas.

Keberadaan data merupakan aspek yang sangat penting untuk mengkaji permasalahan, salah satu contohnya adalah permasalahan data kependudukan. Dengan adanya data kependudukan yang akurat maka dapat mempermudah pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.

Sumber Data Peyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini berasal dari :

- A. Data Registrasi yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis NIK yang telah dibersihkan dan dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Jakarta keadaan Semester Pertama 2025.
- B. Data yang berasal dari Lintas Sektor terkait
Data yang diperoleh dari Lintas Sektor/instansi terkait yang menjadi sumber data adalah:
 1. **Dinas Kesehatan**
Data yang terkait dengan jumlah kelahiran dan kematian Ibu, Bayi dan Balita juga mengenai gizi buruk, Ibu Hamil KEK, dan gizi kurang.
 2. **Dinas Sosial**
Data tentang penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 3. **Dinas Pendidikan**
Data yang terkait dengan data anak sekolah disemua tingkatan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), SLTA , Jumlah guru beserta kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin baik Guru PNS, P3K, maupun Guru Honorer/PTT, Jumlah sekolah, jumlah anak putus sekolah di semua tingkatan dan juga data siswa

yang ditamatkan berdasarkan tingkat pendidikan maupun yang putus sekolah.

4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Data yang terkait dengan tenaga kerja dan pencari kerja.

5. Bappeda

Data yang terkait dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur

6. Dinas Pariwisata

Data yang berkaitan dengan obyek wisata

7. BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Timur

Yakni terkait data jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN/APBD)

8. Stasiun Meteorologi Umu Meheng Kunda Sumba Timur

yakni Data tentang cuaca yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur selama bulan Januari – Juni 2024.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan.

Komposisi Penduduk menurut karakteristik demografi di Kabupaten Sumba Timur akan dilihat berdasarkan struktur dan prosesnya. Keduanya merupakan unsur pembentuk dalam melihat aspek demografi suatu wilayah.

Struktur demografi di Kabupaten Sumba Timur akan dilihat berdasarkan jumlah, pertumbuhan, kepadatan dan distribusinya, sedangkan proses demografi dilihat dari indikator kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) dan migrasi/perpindahan penduduk.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan dalam pasal 58 dijelaskan bahwa manfaat dari data kependudukan adalah untuk :

- a. Pelayanan Publik seperti penerbitan Surat Ijin Mengemudi, Jamkesmas, Ijin usaha, pelayanan perbankan, wajib pajak dan lain-lain.
- b. Perencanaan Pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.
- c. Alokasi Anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
- d. Pembangunan Demokrasi yaitu penyiapan Data Penduduk Potensi Pemilih Pemula (DP4), Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Komponen Kependudukan meliputi :

A. Kuantitas Penduduk.

Kuantitas Penduduk adalah merupakan jumlah keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses demografi seperti fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi/perpindahan penduduk.

Kuantitas Penduduk memuat :

a. Jumlah dan Persebaran Penduduk.

Komposisi penduduk dapat dilihat dari berbagai aspek atau karakteristik tertentu, seperti:

1. Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak
2. Karakteristik sosial antara lain tingkat pendidikan dan status perkawinan
3. Karakteristik ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan
4. Karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal daerah perkotaan-pedesaan, Kecamatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut ruang, sementara itu penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persebaran penduduk (distribusi penduduk) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Persebaran penduduk secara geografis
- 2) Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan.

Jumlah dan persebaran penduduk memuat :

1. Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling penting karena berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1 - Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan			
Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
KOTA WAINGAPU	18.796	18.405	37.201
HAHARU	3.732	3.481	7.213
LEWA	9.105	8.693	17.798
NGGAHA ORI ANGU	5.619	5.518	11.137
TABUNDUNG	5.338	5.010	10.348
PINU PAHAR	4.215	3.920	8.135
PANDAWAI	10.312	9.802	20.114
UMALULU	10.418	10.022	20.440
RINDI	5.815	5.579	11.394
PAHUNGA LODU	7.624	7.529	15.153
WULLA WAIJILU	4.537	4.392	8.929
PABERIWAI	3.740	3.334	7.074
KARERA	4.612	4.384	8.996
KAHAUNGU ETI	5.428	5.107	10.535

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
MATAWAI LA PAWU	3.750	3.401	7.151
KAMBERA	18.586	17.841	36.427
KAMBATA MAPAMBUHANG	2.324	2.185	4.509
LEWA TIDAHU	4.274	4.003	8.277
KATALA HAMU LINGU	2.341	2.311	4.652
KANATANG	6.406	6.065	12.471
NGADU NGALA	3.165	2.827	5.992
MAHU	2.764	2.448	5.212
TOTAL	142.901	136.257	279.158

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.

Dari tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Keadaan 30 Juni 2025 adalah sebesar 279.158 jiwa dan untuk tingkat Kecamatan jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Kota Waingapu dengan jumlah 37.201 jiwa (13,33 %). Pada Kecamatan Kota Waingapu dalam 6 (enam) bulan terakhir terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 188 jiwa dari jumlah penduduk 37.013 jiwa pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat kelahiran yang tinggi serta akibat migrasi atau pindah datang penduduk. Juga menurunnya angka kematian. Sedangkan Kecamatan Kambata Mapambuhang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 4.509 Jiwa (1,6 %) ada penambahan sebanyak 153 jiwa jika dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2024. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin nampak bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting untuk diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu.



Diagram Pie (Pie Chart) memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari potongan-potongan pie tersebut, dimana setiap potongan pie akan menampilkan ukuran tertentu yang mana total persentasenya harus 100%.

2. Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)

Yang dimaksudkan dengan kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah dengan kata lain Kepadatan penduduk adalah banyanya penduduk per satuan luas atau merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni/ditempati.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Jiwa	%	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk	Ranking
KOTA WAINGAPU	37.201	13,33	73.8	504,08	2
HAHARU	7.213	2,58	601.5	11,99	20
LEWA	17.798	6,38	281.1	63,32	4
NGGAHA ORI ANGU	11.137	3,99	286.4	38,89	9
TABUNDUNG	10.348	3,71	514.4	20,12	18
PINU PAHAR	8.135	2,91	246.6	32,99	11
PANDAWAI	20.114	7,21	412.6	48,75	5
UMALULU	20.440	7,32	307.9	66,39	3
RINDI	11.394	4,08	366.5	31,09	12
PAHUNGA LODU	15.153	5,43	349.8	43,32	7
WULLA WAIJILU	8.929	3,20	221.3	40,35	8
PABERIWAI	7.074	2,53	199.7	35,42	10
KARERA	8.996	3,22	334.6	26,89	14
KAHAUNGU ETI	10.535	3,77	475.1	22,17	17
MATAWAI LA PAWU	7.151	2,56	405.4	17,64	19
KAMBERA	36.427	13,05	52	700,52	1
KAMBATA MAPAMBUHANG	4.509	1,62	412.7	10,93	21
LEWA TIDAHU	8.277	2,96	322.1	25,70	16
KATALA HAMU LINGU	4.652	1,67	453.1	10,27	22
KANATANG	12.471	4,47	279.4	44,63	6
NGADU NGALA	5.992	2,15	207.9	28,82	13
MAHU	5.212	1,87	196.6	26,51	15
JUMLAH	279,158		7000.5	39,88	

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.

Tabel 2 memperlihatkan kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7000,5 km2 yang didiami oleh 279.158 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 39,88 jiwa/km2. Dengan kata lain rata-rata setiap km2

Sumba Timur di diami sebanyak 39-40 jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya (6 bulan terakhir) keadaan 31 Desember 2024, ada peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1.868 jiwa atau sebanyak 0,7% yang mengakibatkan berpengaruh pada kepadatan penduduk.

Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Kampera merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 700-701 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kota Waingapu sebesar 504 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Katala Hamu Lingu yaitu sebesar 10 jiwa/km² dengan luas wilayah sebesar 453.1 km². Untuk pengembangan penduduk kedepannya masih banyak potensi lahan yang tersedia jika dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kampera dan Kota Waingapu terjadi diakibatkan karena persebaran penduduk yang tidak merata dan juga arus pindah datang penduduk yang tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh, dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu perhatian khusus untuk Kecamatan Kampera dan Kecamatan Kota Waingapu terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3 - Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk				
Kecamatan	Penduduk Tahun 2023	Penduduk Tahun 2024	Penduduk Tahun 2025	Angka Pertumbuhan Penduduk
KOTA WAINGAPU	36.053	37.013	37.201	1,58
HAHARU	6.749	7.151	7.213	3,38
LEWA	16.791	17.659	17.798	2,95
NGGAHA ORI ANGU	10.597	11.101	11.137	2,52

Kecamatan	Penduduk Tahun 2023	Penduduk Tahun 2024	Penduduk Tahun 2025	Angka Pertumbuhan Penduduk
TABUNDUNG	9.869	10.300	10.348	2,40
PINU PAHAR	7.707	8.103	8.135	2,74
PANDAWAI	19.049	19.907	20.114	2,76
UMALULU	19.445	20.280	20.440	2,53
RINDI	10.666	11.356	11.394	3,36
PAHUNGA LODU	14.501	15.064	15.153	2,22
WULLA WAIJILU	8.703	8.886	8.929	1,29
PABERIWAI	6.762	7.050	7.074	2,28
KARERA	8.430	8.919	8.996	3,30
KAHAUNGU ETI	9.991	10.435	10.535	2,69
MATAWAI LA PAWU	6.780	7.090	7.151	2,70
KAMBERA	35.165	36.153	36.427	1,78
KAMBATA MAPAMBUHANG	4.194	4.479	4.509	3,69
LEWA TIDAHU	7.757	8.213	8.277	3,30
KATALA HAMU LINGU	4.365	4.628	4.652	3,24
KANATANG	11.804	12.382	12.471	2,79
NGADU NGALA	5.709	5.965	5.992	2,45
MAHU	4.792	5.156	5.212	4,29
JUMLAH	265.879	277.290	279.158	2,47
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.				

Data penduduk tahun 2023 yang digunakan adalah Data Konsolidasi Bersih keadaan 31 Desember 2023 (DKB Semester dua), begitu juga dengan data penduduk tahun 2024 menggunakan Data Konsolidasi Bersih 31 Desember 2024 (DKB Semester dua) sedangkan Data tahun 2025 menggunakan Data Konsolidasi Bersih Keadaan 30 Juni 2025 (DKB Semester Pertama). Pertumbuhan penduduk yang dihitung merupakan pertambahan penduduk dalam 12 bulan atau setahun, khusus untuk tahun 2025 yang dihitung adalah pertumbuhan penduduk dalam waktu 6 bulan.

Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Timur sekaligus mencerminkan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2 tahun 6 bulan dari tahun 2023 sampai 2025 tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Selama 2 tahun 6 bulan dari tahun 2023-2025 hanya 2,47 %. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan Data SIAK.

Jika dilihat menurut Kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Mahu yaitu 4,29%, diikuti Kecamatan Kambata Mapa Mbuhanng yaitu sebesar 3,69 %.

b. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Komposisi Penduduk menurut karakteristik demografi di Kabupaten Sumba Timur akan dilihat berdasarkan struktur dan prosesnya. Keduanya merupakan unsur pembentuk dalam melihat aspek demografi suatu wilayah.

Struktur demografi di Kabupaten Sumba Timur akan dilihat berdasarkan jumlah, pertumbuhan, kepadatan dan distribusinya, sedangkan proses demografi dilihat dari indikator kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas).

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah jenis kelamin dan umur.

Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (single age) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Selain pengelompokkan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :

- a) Penduduk usia di bawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun
- b) Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-59 tahun
- c) Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 60 tahun ke atas (mengikuti ketentuan WHO)

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila jumlah penduduk yang berumur di bawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih.

Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, sandang, ketenagakerjaan, dan kelompok tua membutuhkan fasilitas untuk kesehatan, ketenagakerjaan, kebutuhan sosial lainnya.

Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

1. Umur Median (Median Age)
2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
3. Piramida Penduduk
4. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (dependency ratio)

1) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling penting karena berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang,

papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi anak usia sekolah selain juga mendapat asupan gizi yang baik, agar lebih diperhatikan dalam hal investasi pendidikan, agar semua anak usia sekolah dipastikan mendapatkan pendidikan yang memadai dan ketrampilan juga lingkungan pergaulan yang positif baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat sehingga menjadi anak-anak yang berkualitas dalam hal SDM dan berkepribadian baik sehingga beberapa tahun kemudian, ketika mereka masuk ke dunia kerja, mereka mampu bersaing untuk memperoleh peluang kerja yang tersedia. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau piramida penduduk.

Tabel 4 - Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
00-04	6.997	6.529	13.526
05-09	14.331	13.453	27.784
10-14	15.041	14.103	29.144
15-19	15.043	13.960	29.003
20-24	13.593	13.087	26.680
25-29	12.667	12.014	24.681
30-34	10.703	10.162	20.865
35-39	10.010	9.629	19.639
40-44	8.734	8.940	17.674
45-49	7.855	7.927	15.782
50-54	6.978	6.715	13.693
55-59	5.749	5.397	11.146
60-64	4.685	4.389	9.074
65-69	4.003	3.807	7.810
70-74	2.717	2.539	5.256
> 75	3.795	3.606	7.401
JUMLAH	142.901	136.257	279.158
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.			

Pada Tabel 4, berdasarkan DKB Semester Pertama Tahun 2025 terlihat bahwa penduduk Kabupaten Sumba Timur sebagian besar merupakan penduduk usia produktif, yaitu berada pada kelompok antara usia 15-64 tahun (67,4%) dengan penduduk sebesar 180.191 jiwa dengan komposisi terbesar ada pada kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 29.003 jiwa. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar penduduk merupakan usia kerja. Sisanya yang sebanyak 32,6% adalah merupakan penduduk usia non produktif yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Sedangkan untuk komposisi penduduk menurut jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki terbesar ada pada usia 15-19 tahun sebanyak 15.043 jiwa (5,4%) dan untuk jumlah penduduk perempuan terbesar ada pada kelompok usia 10-14 tahun sebanyak 14.103 jiwa (5,1%). Dari semua kelompok umur, jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jenis kelamin perempuan hanya pada usia 40-44 tahun jenis kelamin perempuan lebih besar daripada jenis kelamin laki-laki.

1. Umur Median (Median Age)

Umur Median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda, dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur Median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur Median, penduduk disuatu daerah dikategorikan :

- 1) Penduduk muda, jika umur Median kurang dari 20 tahun
- 2) Penduduk Intermediate, jika umur Median antara 20-30 tahun
- 3) Penduduk tua jika umur Median lebih dari 30 tahun

Untuk menghitung umur median adalah dengan menggunakan Rumus:

$$\text{Umur Median MD} = I_{md} \left[\frac{\frac{N}{2} - Fx}{F_{md}} \right] X_i$$

I_{md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung $N/2$

N = Jumlah Penduduk total

F_x = Jumlah Penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$

F_{md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2$

i = Kelas interval umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
00-04	13,526	13.526	4,84
05-09	27,784	41.310	14,80

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
10-14	29,144	70.454	25,23
15-19	29,003	99.457	35,62
20-24	26,680	126.137	45,18
25-29	24,681	150.818	54,02
30-34	20,865	171.683	61,5
35-39	19,639	191.322	68,53
40-44	17,674	208.996	74,86
45-49	15,782	224.778	80,51
50-54	13,693	238.471	85,42
55-59	11,146	249.617	89,41
60-64	9,074	258.691	92,66
65-69	7,810	266.501	95,46
70-74	5,256	271.757	97,34
> 75	7,401	279.158	100

Umur Median

$$\begin{aligned}
 MD &= 25 + \left\{ \frac{279,158 - 126,137}{2} \right\} \times 5 \\
 &= 25 + \left\{ \frac{139,579 - 126,137}{150,818 - 126,137} \right\} \times 5 \\
 &= 25 + \left\{ \frac{13,442}{24,681} \right\} \times 5 \\
 &= 25 + 0,54 \times 5 = 25 + 2,7 = 27,7 = 28
 \end{aligned}$$

Rumus pencarian Umur Median di atas terlihat bahwa umur Median penduduk Kabupaten Sumba Timur per 30 Juni 2025 adalah 28 tahun. Hal ini dapat dimaknai bahwa setengah penduduk Sumba Timur berusia kurang dari 28 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih dari 28 tahun. Umur Median ini berkisar antara 20-30 tahun. Data ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumba Timur dikategorikan sebagai penduduk **intermediate**.

1. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh:

- 1) Rasio jenis kelamin waktu lahir (sex ratio at birth), biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 104-105 bayi laki-laki dari 100 bayi perempuan.
- 2) Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan
- 3) Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan

Data Rasio Jenis Kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan perempuan dan laki-laki secara adil. Selain itu informasi Rasio jenis Kelamin juga penting diketahui oleh para politisi terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik.

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Penduduk	Ratio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
00-04	6,997	6,529	13,526	107,16
05-09	14,331	13,453	27,784	106,52
10-14	15,041	14,103	29,144	106,65
15-19	15,043	13,960	29,003	107,75
20-24	13,593	13,807	26,680	98,45
25-29	12,667	12,014	24,681	105,43
30-34	10,703	10,162	20,865	105,32
35-39	10,010	9,629	19,639	103,95
40-44	8,734	8,940	17,674	97,69
45-49	7,855	7,927	15,782	99,09
50-54	6,978	6,715	13,693	103,91
55-59	5,749	5,397	11,146	106,52
60-64	4,685	4,389	9,074	106,74
65-69	4,003	3,407	7,810	117,49
70-74	2,717	2,539	5,256	107,01
>75	3,795	3,606	7,401	105,24
Jumlah	142,901	136,257	279,158	104,87
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025				

Pada Tabel 5 ini disajikan Rasio Jenis Kelamin menurut kelompok umur. Komposisi ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa hal seperti jumlah tenaga produktif dan tidak produktif, penambahan penduduk dan angka ketergantungan.

Dari Tabel 5 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Sumba Timur berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Keadaan 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025 (Semester Pertama) adalah 104,87 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104-105 orang penduduk laki-laki. Gambaran rasio jenis kelamin di Sumba Timur lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Begitu juga jika dilihat dari kelompok umur yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 29.144 jiwa (10,43 %) dengan rasio jenis kelamin sebesar 106,65 sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-04 tahun jumlah penduduk laki-laki sebesar 6.997 jiwa (2,5 %) dengan rasio jenis kelamin sebesar 107,16 % yang artinya terdapat 107 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Dengan kata lain umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup laki-laki. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur 60-64 tahun juga menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk laki-laki sebesar 4.685 (1,67 %) dengan rasio jenis kelamin sebesar 106,74 yang berarti terdapat 106-107 penduduk berjenis kelamin laki-laki dari 100 penduduk berjenis kelamin perempuan di usia tersebut.

Tabel 6 - Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah	Ratio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
KOTA WANGAPU	18,796	18,405	37,201	102,12
HAHARU	3,732	3,481	7,213	107,21
LEWA	9,105	8,693	17,798	104,73
NGGAHA ORI ANGU	5,619	5,518	11,137	101,83
TABUNDUNG	5,338	5,010	10,348	106,54
PINU PAHAR	4,215	3,920	8,135	107,52
PANDAWAI	10,312	9,802	20,114	105,20
UMALULU	10,418	10,022	20,440	103,95
RINDI	5,815	5,579	11,394	104,23
PAHUNGA LODU	7,624	7,529	15,153	101,26
WULLA WAIJILU	4,537	4,392	8,929	103,30

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah	Ratio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
PABERIWAI	3,740	3,334	7,074	112,17
KARERA	4,612	4,384	8,996	105,20
KAHAUNGU ETI	5,428	5,107	10,535	106,28
MATAWAI LA PAWU	3,750	3,401	7,151	110,26
KAMBERA	18,586	17,841	36,427	104,17
KAMBATA MAPAMBUHANG	2,324	2,185	4,509	106,36
LEWA TIDAHU	4,274	4,003	8,277	106,76
KATALA HAMU LINGU	2,341	2,311	4,652	101,29
KANATANG	6,406	6,065	12,471	105,62
NGADU NGALA	3,165	2,827	5,992	111,95
MAHU	2,764	2,448	5,212	112,90
TOTAL	142,901	136,257	279,158	104,87
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025				

Dari Tabel 6 terlihat bahwa rasio jenis kelamin (sex ratio) di setiap kecamatan berada di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap kecamatan lebih tinggi dari jumlah penduduk perempuan. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa rasio jenis kelamin terbesar 112,90 berada pada Kecamatan Mahu yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan, ada 112-113 penduduk laki-laki, yang diikuti oleh Kecamatan Paberiwai sebesar 112,17, sedangkan rasio jenis kelamin terkecil 101,26 berada pada Kecamatan Pahunga Lodu.

2. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik pada saat tertentu.

Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan. Fungsi dari piramida penduduk ini yaitu mempermudah pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan dan menentukan kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan.



Gambar 2 - Piramida Penduduk

Pada *Gambar diatas*, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur didominasi oleh kelompok umur 10-14 tahun. Ini berarti angka kelahiran meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Piramida ini dapat menjadi ciri bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia muda. Menurut macamnya, piramida ini adalah **Piramida Penduduk Muda (Constrictive)**. Demikian juga dengan jumlah penduduk umur 5-9 tahun masih terlihat lebar, artinya bahwa untuk lima tahun ke depan masih dibutuhkan fasilitas yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini, misalnya fasilitas pendidikan, olah raga dan lain sebagainya. Sedangkan hanya sedikit kelompok berusia tua.

3. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (dependency ratio)

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk belum dan tidak produktif. Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk

berusia 15-64 tahun adalah penduduk usia produktif yang dianggap memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan semakin rendah Dependency Ratio, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi (<15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 7 - Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif					
No	Jenis Kelamin	Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan
		Non Produktif		Produktif	
		0-14 thn	>= 65 thn	15-64 thn	
1	Laki-laki	36,369	10,515	96,017	48,83
2	Perempuan	34,085	9,952	92,220	47,75
3	Total	70,454	20,467	188,237	48,30
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.					

Dari Tabel di atas nampak bahwa Rasio Ketergantungan sebesar 48,30 yang artinya bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Sumba Timur, mempunyai beban tanggungan sebanyak 48 penduduk non produktif.

Tabel 8 – Rasio Ketergantungan menurut jenis kelamin				
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ratio Ketergantungan
0-14 Tahun (Umur Muda)	36.369	34.085	70.454	37,4
15-64 Tahun (Umur Produktif)	96.017	92.220	188.237	
>= 65 Tahun (Umur Tua)	10.515	9.952	20.467	10,87
Jumlah	142.901	136.257	279.158	48,3
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.				

Dari Tabel 8 nampak bahwa jumlah penduduk Sumba Timur umur produktif (usia kerja) 15-64 tahun sebesar 188.237 jiwa (67,43 %) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) rasio 37,43 dengan jumlah penduduk sebanyak 70.454 jiwa (25,23 %) dan rasio penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) rasio sebesar 10,87 dengan jumlah penduduk sebanyak 20.467 jiwa (7,33%). Penduduk muda usia < 15 tahun dianggap

sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggung hidupnya.

Demikian juga penduduk diusia >65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun bagi yang pernah bekerja. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih besar dari pada penduduk usia produktif perempuan.

Rasio Ketergantungan sebesar 48,3 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 37,43 dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 10,87. Hal ini menunjukkan bahwa angka beban ketergantungan usia muda yang paling berperan dalam mendorong tingginya angka beban ketergantungan secara total. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas penduduk dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.

c. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dalam bentuk tabel. Informasi ini bertujuan untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan dan kualitas SDM di Kabupaten Sumba Timur.

Peningkatan SDM disuatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan, semakin baik kualitas SDM daerah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik hard skill maupun soft skill. Menurut beberapa pelaku usaha bahwa juga harus ditunjang dengan kepribadian/attitude yang baik, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB). Oleh sebab itu, sangat diharapkan kejujuran Masyarakat dalam melakukan pelaporan untuk menentukan pengklasifikasian distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan sehingga database yang terbentuk menjadi akurat dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Tabel distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 - Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan			
Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	39.288	36.473	75.761
Belum Tamat SD/Sederajat	20.310	17.754	38.064
Tamat SD/Sederajat	36.631	34.248	70.879
SLTP/Sederajat	15.414	15.442	30.856
SLTA/Sederajat	23.974	22.486	46.460
Diploma I/II	398	413	811
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.021	1.874	2.895
Diploma IV/Strata I	5.644	7.388	13.032
Strata II	211	178	389
Strata III	10	1	11
Jumlah	142.901	136.257	279.158
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.			

Dari tabel 9 ini terlihat bahwa posisi tertinggi untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan, berada pada tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebanyak 70.879 jiwa (25,39%). Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk yang tamat SD/ sederajat untuk penduduk laki-laki sebesar 36.631 jiwa (13,12 %), lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan sebesar 34.248 jiwa (12,26%). Demikian juga pada jenjang pendidikan SLTA, sedangkan pada jenjang Pendidikan SLTP didominasi oleh penduduk perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah, lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi sekolah.

Oleh karena itu perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyediaan program pendidikan terutama bagi penduduk miskin atau penduduk tidak mampu.

Sementara itu untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jumlah penduduk perempuan yang tamat Diploma I/II, Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda dan Diploma IV/Strata I lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, namun untuk pendidikan Strata II dan Strata III jumlah penduduk laki-laki yang menamatkannya lebih tinggi dibandingkan penduduk Perempuan, ini menunjukkan kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang baik di Kabupaten Sumba Timur.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi berdasarkan agama dan kepercayaan Semester Pertama Tahun 2024 yang disajikan perkecamatan dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan hidup antar umat beragama di kabupaten Sumba Timur.

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Kepercayaan TYME (Marapu)
KOTA WAINGAPU	11.837	18.312	5.114	227	13	-	1.698
HAHARU	69	5.223	437	-	-	-	1.484
LEWA	811	15.030	1.706	5	-	-	246
NGGAHA ORI ANGU	9	9.756	779	10	-	-	583
TABUNDUNG	12	9.750	234	-	-	-	352
PINU PAHAR	1	8.086	23	-	-	-	25
PANDAWAI	255	16.199	2.562	12	-	-	1.086
UMALULU	955	14.908	1.075	13	1	3	3.485
RINDI	1.007	7.006	248	6	-	-	3.127
PAHUNGA LODU	578	12.567	1.671	3	1	-	333
WULLA WAJILU	53	7.036	1.788	-	-	-	52
PABERIWAI	8	6.839	84	-	-	-	143
KARERA	712	7.795	447	-	-	-	42
KAHAUNGU ETI	24	8.789	649	5	-	-	1.068
MATAWAI LA PAWU	6	7.073	46	-	-	-	26
KAMBERA	820	30.998	4.331	121	3	-	154
KAMBATA MAPAMBUHANG	6	4.136	171	-	-	-	196
LEWA TIDAHU	22	7.875	355	-	-	-	25
KATALA HAMU LINGU	9	3.894	115	-	-	-	634
KANATANG	322	7.856	2.948	18	-	-	1.327
NGADU NGALA	5	5.217	709	-	-	-	61
MAHU	12	3.622	858	-	-	-	720
TOTAL	17.533	217.967	26.350	420	18	3	16.867

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa pada Semester Pertama Tahun 2025 pada umumnya penduduk Kabupaten Sumba Timur Agama Kristen sebanyak 217.967 Jiwa (78,1 %), yang disusul oleh Agama Katholik sebanyak 26.350 jiwa (9,4 %), kemudian diikuti oleh Agama Islam sebanyak 17.533 jiwa (6,3 %), Kepercayaan Marapu sebanyak 16.867 jiwa (6 %), Hindu sebanyak 420 jiwa (0,2 %), Budha sebanyak 18 Jiwa (0,006 % dan Konghuchu sebanyak 3 jiwa (0,001%).

3. Jumlah penduduk menurut kecacatan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel. Selama ini pemerintah pusat terus berupaya untuk memberikan perhatian bagi kelompok penyandang disabilitas dengan memberikan dukungan, memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan mereka dan diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pelayanan publik. Informasi jumlah penyandang disabilitas ini sangat diperlukan untuk melakukan perencanaan pelayanan dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain-lain. Data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 11 ini.

Tabel 11 - Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan			
PENYANDANG CACAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Cacat Fisik	88	50	138
Cacat Netra/Buta	39	25	64
Cacat Rungu/Wicara	65	57	122
Cacat Mental/Jiwa	107	84	191
Cacat Fisik dan Mental	6	12	18
Cacat Lainnya	24	14	38
TOTAL	329	242	571
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.			

Dari Tabel 11 yang merupakan data hasil konsolidasi bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2025 terlihat bahwa jenis kecacatan terbesar adalah penyandang cacat mental/jiwa yaitu 191 jiwa (33,5%), diikuti penyandang cacat fisik sebanyak 138 jiwa (24,2 %) dan terkecil adalah penyandang cacat fisik dan mental sebanyak 18 jiwa (3,2%). Total penyandang cacat yang terdata dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 571 jiwa (0,2% dari jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur). Jika dibandingkan dengan jumlah data yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur sebanyak 1.900 jiwa, sehingga ada perbedaan atau selisih data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait. Secara fisik mereka sebagai penyandang disabilitas namun secara administrasi mereka tidak melaporkan keadaan sebenarnya menurut kecacatannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan

koordinasi lintas sektoral dan Dinas Sosial melakukan pendataan ulang penyandang disabilitas agar pemberian bantuan seperti PKH dan bantuan sosial lainnya tepat sasaran.

Diharapkan juga agar penyandang disabilitas yang sudah memiliki dokumen kependudukan tetapi belum tercantum jenis kecacatannya, supaya melaporkan untuk perubahan datanya/updating data sesuai jenis kecacatannya.

4. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin disuatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin meliputi belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Dalam hal ini konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (dejure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto)

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan informasi penduduk berstatus kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
Kota Waingapu	13.139	22.122	216	1.724	37.201
Haharu	2.435	4.465	28	285	7.213
Lewa	6.153	10.890	42	713	17.798
Nggaha Ori Angu	4.075	6.661	24	377	11.137
Tabundung	3.589	6.341	17	401	10.348
Pinu Pahar	3.029	4.845	11	250	8.135
Pandawai	6.867	12.448	39	760	20.114
Umalulu	6.936	12.587	78	839	20.440
Rindi	3.943	7.020	52	379	11.394
Pahunga Lodu	5.270	9.285	34	564	15.153
Wulla Waijilu	3.126	5.443	39	321	8.929
Paberiwai	2.265	4.557	20	232	7.074
Karera	3.260	5.440	29	267	8.996
Kahaungu Eti	3.768	6.341	57	369	10.535
Matawai La Pawu	2.369	4.520	6	256	7.151
Kambara	12.192	22.542	137	1.556	36.427
Kambata Mapambuhang	1.557	2.789	12	151	4.509
Lewa Tidahu	2.943	5.018	20	296	8.277
Katala Hamu Lingu	1.679	2.820	8	145	4.652

Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
Kanatang	4.336	7.654	45	436	12.471
Ngadu Ngala	2.057	3.695	27	213	5.992
Mahu	1.809	3.200	25	178	5.212
Total	96.797	170.683	966	10.712	279.158
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.					

Pada Tabel 12 dari hasil DKB Semester Pertama Tahun 2025 menunjukkan bahwa penduduk Sumba Timur didominasi oleh penduduk berstatus kawin sebanyak 170,683 jiwa atau 61,14 %. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, ada lonjakan yang cukup tinggi dalam status kawin, hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang cukup tinggi bagi masyarakat untuk melegalkan perkawinannya baik secara agama/kepercayaan dan secara hukum

Status kawin yang dimaksudkan disini adalah status kawin yang perkawinannya sah menurut hukum agama/kepercayaan dan sah secara hukum Negara (*de jure*) yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta Perkawinan. Dalam dokumen kependudukan akan nampak status perkawinan Tercatat dan Tidak Tercatat. Maksud dari Perkawinan Tercatat adalah yang perkawinannya disahkan baik secara hukum agama/kepercayaan maupun secara hukum negara (pencatatan sipil). Sedangkan Perkawinan Tidak Tercatat adalah perkawinan terjadi hanya berdasarkan perkawinan secara agama, ataupun pasangan yang telah hidup bersama dalam jangka waktu yang lama (*de facto*) dan didukung dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Perkawinan. Untuk status kawinnya tercatat atau tidak tercatat akan nampak pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga. Sedangkan status Cerai Hidup adalah status perkawinan yang telah diputuskan hubungan perceraian secara sah melalui penetapan pengadilan dan dibuktikan dengan Akta Perceraian, sedangkan pasangan Cerai Mati dimana pasangan dari perkawinan yang sah tersebut telah meninggal dunia dan dibuktikan dengan kepemilikan Akta Kematian dari pasangan yang telah meninggal tersebut. Status Cerai Hidup dan Cerai Mati hanya tercantum pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

a) Angka Perkawinan Kasar (APK)

Informasi tentang struktur penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Angka Perkawinan Kasar menunjukkan jumlah

perkawinan per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka Perkawinan Kasar ini merupakan indikator yang sangat sederhana tanpa memperhatikan umur dan jenis kelamin. Angka Perkawinan Kasar dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\bar{M} = \frac{M}{P} \times K$$

$$\frac{96.797}{279.158} \times 1000 = 346,7$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa Angka Perkawinan Kasar di Kabupaten Sumba Timur sebesar 346,7 yang artinya bahwa pada Semester Pertama Tahun 2025, dari 1000 penduduk terdapat 346-347 orang berstatus kawin.

b) Angka Perkawinan Umum (AKU)

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu

Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam AKU hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja dalam perhitungan yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebagai penyebut.

$$\frac{M}{P_{15+}} \times 1000$$

$$\frac{96.797}{208.704} \times 1000 = 463,8$$

Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa Angka Perkawinan Umum di Kabupaten Sumba Timur pada Semester Pertama Tahun 2025, dari 1000 penduduk terdapat sebesar 463-464 orang yang berstatus kawin.

5. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Keluarga sebagai unit

terkecil dalam masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya dalam hal jumlah anggota keluarga, tetapi juga dalam hal kualitas hidup keluarga.

Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu :

- ✓ Keluarga Inti (Nuclear Family) yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak kandung, anak angkat maupun anak adopsi yang belum kawin.
- ✓ Keluarga Luas (Extended Family) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

a) Jumlah keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.

Keluarga terbentuk karena adanya sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi/pengangkatan anak dan lain sebagainya.

Banyaknya anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan bahwa semakin kecil jumlah anggota keluarga, biasanya akan semakin baik tingkat kesejahtraannya.

Saat ini banyak bermuculan keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak, menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan sandwiches family, dimana pasangan suami isteri harus menanggung orang tua/mertua dan anak cucu mereka sendiri.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistim pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga seperti ini.

Rata-rata jumlah anggota keluarga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{AK} = \text{Rata - rata jumlah anggota keluarga}$$

$$\sum Pddk = \text{Jumlah penduduk}$$

$$\sum KK = \text{Jumlah Kepala Keluarga}$$

Tabel 13 - Jumlah Penduduk, Kepala keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga			
Kecamatan	Jlh Penduduk	Jlh Kepala Keluarga	Rata-Rata Anggota
KOTA WAINGAPU	37.201	10.262	3,63
HAHARU	7.213	2.100	3,43
LEWA	17.798	4.680	3,80
NGGAHA ORI ANGU	11.137	3.218	3,46
TABUNDUNG	10.348	3.439	3,01
PINU PAHAR	8.135	2.298	3,54
PANDAWAI	20.114	5.265	3,82
UMALULU	20.440	5.430	3,76
RINDI	11.394	2.905	3,92
PAHUNGA LODU	15.153	4.055	3,74
WULLA WAIJILU	8.929	2.360	3,78
PABERIWAI	7.074	1.991	3,55
KARERA	8.996	2.452	3,67
KAHAUNGU ETI	10.535	2.840	3,71
MATAWAI LA PAWU	7.151	1.984	3,60
KAMBERA	36.427	9.933	3,67
KAMBATA	4.509	1.215	3,71
MAPAMBUHANG			
LEWA TIDAHU	8.277	2.158	3,84
KATALA HAMU LINGU	4.652	1.174	3,96
KANATANG	12.471	3.221	3,87
NGADU NGALA	5.992	1.865	3,21
MAHU	5.212	1.595	3,27
TOTAL	279.158	76.440	3,65
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025			

Dari tabel 13 nampak bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sumba Timur berkisar antara 3-4 orang dan merupakan keluarga inti.

Oleh sebab itu perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian pertambahan penduduk.

b) Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)

Hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, isteri, anak,

menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel - 14 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga			
Status Hub Dalam Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Keluarga	58.200	18.240	76.440
Suami	14	0	14
Isteri	0	45.027	45.027
Anak	75.957	64.932	140.889
Menantu	1	1	2
Cucu	2.735	2.398	5.133
Orang Tua	47	278	325
Mertua	3	19	22
Famili Lain	5.900	5.317	11.217
Pembantu	3	2	5
Lainn`ya	41	43	84
Jumlah	142.901	136.257	279.158
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025			

Dari Tabel 14 tersebut nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri, dimana kepala keluarga laki-laki sebanyak 58,200 jiwa (20,84 %) mempunyai isteri sebanyak 45.027 jiwa (16,12 %). Sedangkan jumlah kepala keluarga perempuan sebesar 18.240 jiwa (6,5%) terdapat 14 jiwa yang berstatus suami (0,05 %), yang lainnya berstatus sebagai anggota keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan yang tidak mempunyai suami pada umumnya berstatus lajang tapi mempunyai tanggungan keluarga baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda baik karena cerai mati maupun cerai hidup.

Dari Tabel 14 juga nampak bahwa anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus anak sebanyak 140.889 jiwa (50,5 %), sedangkan yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, family lain, pembantu dan lainnya menunjukkan proporsi yang rendah yaitu hanya 16.788 jiwa (6 %).

c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Kepala keluarga adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga. Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi sekaligus sebagai kepala keluarga, namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai mati, cerai hidup ataupun mengikuti trend gaya hidup

modern hidup melajang atau tidak menikah.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Tabel 15 - Jumlah Proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin			
Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kota Waingapu	7.771	2.491	10.262
Haharu	1.573	527	2.100
Lewa	3.519	1.161	4.680
Nggaha Ori Angu	2.403	815	3.218
Tabundung	2.559	880	3.439
Pinu Pahar	1.832	466	2.298
Pandawai	4.027	1.238	5.265
Umalulu	4.112	1.318	5.430
Rindi	2.257	648	2.905
Pahunga Lodu	3.044	1.011	4.055
Wulla Waijilu	1.830	530	2.360
Paberiwai	1.532	459	1.991
Karera	1.904	548	2.452
Kahaungu Eti	2.212	628	2.840
Matawai La Pawu	1.540	444	1.984
Kambara	7.347	2.586	9.933
Kambata Mapambuhang	963	252	1.215
Lewa Tidahu	1.687	471	2.158
Katala Hamu Lingu	911	263	1.174
Kanatang	2.514	707	3.221
Ngadu Ngala	1.436	429	1.865
Mahu	1.227	368	1.595
Total	58.200	18.240	76.440
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025			

Pada Tabel 15, jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025 sebanyak 76.440 Kepala Keluarga yang tersebar di 22 kecamatan. Kecamatan Kota Waingapu dengan jumlah penduduk terbanyak, tentunya mempunyai jumlah Kepala Keluarga terbesar yakni sebesar 10.262 Jiwa (13,42%) disusul oleh Kecamatan Kambara sebanyak 9.933 Jiwa (13%). Sedangkan jumlah kepala keluarga terkecil yaitu Kecamatan Katala Hamu Lingu, mempunyai Kepala Keluarga sebanyak 1.174 jiwa (1,53%). Sedangkan rata-rata anggota keluarga adalah 3,65% per keluarga, menunjukkan bahwa anggota keluarga di Kabupaten Sumba Timur lebih banyak merupakan Keluarga Inti (nuclear family) dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang.

Tabel 15 diatas terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Sumba Timur adalah laki-laki sebanyak 58.200 jiwa (76,1%), sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 18.240 jiwa (23,86%). Jumlah kepala keluarga laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Kota Waingapu sebanyak 7.771 jiwa (10,16%) disusul Kecamatan Kambera sebanyak 7.347 jiwa (9,61%), sedangkan terkecil berada di Kecamatan Katala Hamu Lingu sebanyak 911 jiwa (1,19%), sedangkan kepala keluarga perempuan terbanyak berada di Kecamatan Kambera sebanyak 2.586 jiwa (3,38%), disusul oleh Kecamatan kota Waingapu sebanyak 2.491 jiwa (3,25%).

d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok umur

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, Pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lain.

Kelompok Umur	Kepala Keluarga		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
15-19	77	82	159	0,21
20-24	823	694	1.517	1,99
25-29	2.907	1.732	4.639	6,07
30-34	5.308	1.708	7.016	9,18
35-39	7.249	1.392	8.641	11,31
40-44	7.458	1.360	8.818	11,54
45-49	7.202	1.362	8.564	11,21
50-54	6.662	1.393	8.055	10,54
55-59	5.591	1.511	7.102	9,29
60-64	4.590	1.524	6.114	8,00
65-69	3.941	1.697	5.638	7,38
70-74	2.670	1.387	4.057	5,31
>75	3.712	2.385	6.097	7,98
	58.190	18.227	76.416	100
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025				

Dari Tabel 16 diatas terlihat bahwa proporsi Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 Tahun (11,54 %). dan Proporsi Kepala Keluarga Laki-laki tertinggi juga berada pada kelompok umur 40-44 tahun (9,76 %).

Sedangkan proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada pada kelompok umur 75 tahun keatas sebesar 2,358 jiwa (3,12%), hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Sumba Timur.

e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga, serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status bekerja dan jenis pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk

Tabel 17 - Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja & Jenis Pekerjaan			
Jenis Pekerjaan	Kepala Keluarga		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum Bekerja	2.257	1.565	3.822
Mengurus Rumah Tangga	1	2.670	2.671
Pelajar/Mahasiswa	965	876	1.841
Pensiunan	1.141	290	1.431
Bekerja	53.836	12.839	66.675
Jumlah	58.200	18.240	76.440
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.			

Dari Tabel 17 diatas terlihat bahwa sebanyak 66,675 kepala keluarga atau sebesar 87,22% status bekerja. Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini menunjukkan perempuan hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Sementara itu sebanyak 3,822 (5%) kepala keluarga tidak/belum bekerja sehingga menjadi perhatian pemerintah bagi kepala keluarga yang belum bekerja untuk membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

f) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi Pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk itu, jenjang Pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 18 - Karakteristik Kepala Keluarga menurut tingkat Pendidikan			
Pendidikan	Kepala Keluarga		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum Sekolah	9.224	3.778	13.002
Belum Tamat SD/Sederajat	1.657	655	2.312
Tamat SD/Sederajat	23.833	6.991	30.824
SLTP/Sederajat	5.967	1.984	7.951
SLTA/Sederajat	12.411	3.528	15.939
Diploma I/II	306	79	385
Akademi/Diploma III/S.Muda	720	257	977
Diploma IV/Strata I	3.902	946	4.848
Strata II	170	22	192
Strata III	10	0	10
Jumlah	58.200	18.240	76.440
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.			

Dari Tabel 18 terlihat bahwa pada semester Pertama Tahun 2025 sebagian besar kepala keluarga berpendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 30,824 (40,3%), disusul dengan tingkat Pendidikan SLTA/Sederajat sebesar 15,939 (20,9%). Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya.

6. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk karena indikator-indikator kelahiran ini berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak. Kelahiran atau fertilitas merupakan satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk disamping penduduk pindah datang. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, seperti pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, kebutuhan sandang, dan lain sebagainya. Di masa depan mereka akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang membutuhkan pendidikan dan kemudian akan masuk pada angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Bayi perempuan akan tumbuh menjadi remaja dan memasuki usia subur yang akan menikah dan melahirkan. Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran adalah jumlah kelahiran.

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Selain itu data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, bahwa pada Semester Pertama Tahun 2025 terjadi kelahiran sebanyak 2.342 Jiwa, jumlah bayi kelahiran hidup sebanyak 2.309 Jiwa, bayi lahir meninggal kematian endogen/neonatal) sebanyak 33 Jiwa, kematian eksogen atau kematian post neo-natal sebanyak 12 jiwa, kematian Balita (usia 0 thn s/d 5 thn – 1 hari) sebanyak 43 orang, anak meninggal (usia 1 thn/d 5 thn-1hari) sebanyak 4 orang, kematian bayi usia 0 bln s/d 1 thn-1hr (IMR) sebanyak 44 orang. Kematian *endogen/neonatal* adalah kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, sedangkan kematian bayi *eksogen atau kematian post neo-natal* adalah kematian bayi usia 1 bulan sampai menjelang usia 12 bulan.

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk karena indikator-indikator kelahiran ini berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.

Adapun penyebab kematian bayi yang umum terjadi adalah berat bayi lahir rendah, Asfiksia (gagal napas), kelainan kongenital/kelainan bawaan (terjadi sejak kehamilan) dan pneumonia.

Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran, salah satunya adalah Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)

- Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.

Angka kelahiran kasar berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Rumusnya :

$$CBR = \frac{B}{P} \times K$$

B = Banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu

K = Konstanta = 1000

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu

Tabel 19 - Angka Kelahiran Kasar

Kecamatan	Jumlah Kelahiran hidup	Jumlah Penduduk	CBR
Kota Waingapu	217	37.201	5,8
Haharu	69	7.213	9,6
Lewa	140	17.798	7,9
Nggaha Ori Angu	107	11.137	9,6
Tabundung	80	10.348	7,7
Pinu Pahar	65	8.135	8
Pandawai	162	20.114	8,1
Umalulu	174	20.440	8,5
Rindi	116	11.394	10,2
Pahunga Lodu	159	15.153	10,5
Wulla Waijilu	81	8.929	9,1
Paberiwai	58	7.074	8,2
Karera	66	8.996	7,3
Kahaungu Eti	126	10.535	12
Matawai La Pawu	44	7.151	6,2
Kambara	257	36.427	7,1
Kambata Mapambuhang	40	4.509	8,9
Lewa Tidahu	57	8.277	6,9
Katala Hamu Lingu	50	4.652	10,7
Kanatang	123	12.471	9,9
Ngadu Ngala	68	5.992	11,3
Mahu	50	5.212	9,6
TOTAL	2.309	279.158	8,3
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025 & Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur			

Pada tabel 19 Menunjukkan Angka Kelahiran Kasar yang terjadi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur keadaan Semester Pertama tahun 2025. Angka Kelahiran Kasar/CBR tertinggi ada pada Kecamatan Ngadu Ngala sebesar 11,3 yang berarti disetiap 1000 penduduk terjadi kelahiran hidup sebesar 11 jiwa, dan CBR terendah ada pada Kecamatan Kota waingapu yaitu 5,8 yang berarti di Kecamatan Kota Waingapu terjadi kelahiran hidup sebanyak 5-6 jiwa di setiap 1000 penduduk. Tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Kelahiran Kasar/CBR di Kabupaten Sumba Timur sebesar 8,3 yang artinya bahwa dari 1000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 8 kelahiran hidup.

7. Kematian (Mortalitas)

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk di suatu wilayah bukan saja akan mempengaruhi pertumbuhan, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi

rendahnya tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Indikator kematian berguna untuk memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kematian dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur dan lain-lain. Kematian juga bisa diakibatkan oleh penyakit menular, kecelakaan, dan gaya hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pelaporan pencatatan kematian adalah merupakan kewajiban dari Ketua RT untuk melaporkan kematian setiap warganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan Akta Kematian dan dihapus datanya dari database kependudukan. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akte Kematian bagi warga masyarakat yang telah meninggal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur telah melakukan suatu terobosan dengan menciptakan Inovasi dengan Branding “JEMPOL CAMAT” (Jemput Bola Pencatatan Kematian), dimana petugas Disdukcapil secara aktif mendatangi rumah duka untuk menjemput data pendukung sesuai persyaratan sebagai bahan pengurusan Akta Kematian. Dispenduk terus menghimbau masyarakat agar melaporkan setiap peristiwa kematian jika ada anggota keluarga yang meninggal.

- **Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate)**
Angka kematian kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Angka kematian kasar dihitung dengan rumus:

$$\text{CDR} = \frac{D}{P} \times K = \frac{10.129}{279.158} \times 1000 = 36,3$$

D = Banyaknya kematian

P = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun

K = Konstanta = 1000

CDR = Angka Kematian Kasar

Dari rumus diatas menunjukkan angka kematian kasar kematian kasar pada pertengahan tahun di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 36, artinya bahwa dari 1000 penduduk Kabupaten Sumba Timur terjadi kematian sebanyak 36 orang pada pertengahan tahun (keadaan Semester Pertama).

B. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas

pembangunan manusia diukur dengan indikator Pembangunan Manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita.

1. Kesehatan

Berikut gambaran penduduk berdasarkan kualitas penduduk Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2024.

a. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator- indikator kelahiran ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dari perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak

b. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun di suatu tempat dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.

Rumus:

$$CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}} \times K = \frac{13.526}{75.719} \times 100 = 17,86$$

Keterangan:

P0-4 = Jumlah Penduduk usia di bawah 5 tahun (0-4 tahun)

P15-49 = Jumlah Penduduk perempuan usia 15-49 tahun

K = Konstanta = 100

Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio anak dan perempuan di Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025 adalah sebesar 17,86 yang berarti bahwa pada Semester Pertama Tahun 2025 terdapat 17-18 anak di bawah usia 5 Tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun.

Tabel 20 - Rasio Anak dan Perempuan (CWR)

Kecamatan	Perempuan Usia 15-49 Tahun	Penduduk Usia 0-4 Tahun	CWR
KOTA WAINGAPU	10.313	1.872	18,15
HAHARU	1.967	375	19,06
LEWA	4.868	897	18,43

Kecamatan	Perempuan Usia 15-49 Tahun	Penduduk Usia 0-4 Tahun	CWR
NGGAHA ORI ANGU	3.073	604	19,66
TABUNDUNG	2.736	369	13,49
PINU PAHAR	2.078	356	17,13
PANDAWAI	5.396	1.119	20,74
UMALULU	5.513	937	17,00
RINDI	3.095	469	15,15
PAHUNGA LODU	4.197	692	16,49
WULLA WAJILU	2.454	444	18,09
PABERIWAI	1.763	312	17,70
KARERA	2.443	378	15,47
KAHAUNGU ETI	2.851	537	18,84
MATAWAI LA PAWU	1.866	295	15,81
KAMBERA	10.130	1.760	17,37
KAMBATA MAPAMBUHANG	1.181	246	20,83
LEWA TIDAHU	2.255	402	17,83
KATALA HAMU LINGU	1.305	223	17,09
KANATANG	3.491	710	20,34
NGADU NGALA	1.535	250	16,29
MAHU	1.209	279	23,08
TOTAL	75.719	13.526	17,86
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025			

c. Jumlah penduduk menurut Golongan Darah

Golongan darah memiliki ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut dan setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Darah adalah komponen yang paling penting dalam tubuh. Kekurangan darah dalam tubuh dapat memicu berbagai penyakit seperti anemia, hipotensi dan serangan jantung.

Beberapa kasus kekurangan darah memerlukan transfuse darah dari pendonor dengan golongan darah yang tepat. Dalam Tabel 20 disajikan jumlah penduduk menurut golongan darah.

Alasan dari perlunya kita mengetahui jenis golongan darah:

- 1) Mencegah respon berbahaya, seperti saat kita menerima donor dari golongan darah yang tidak sesuai dapat menimbulkan respon yang membahayakan tubuh.

- 2) Memudahkan dokter dan tenaga medis saat menangani keadaan gawat darurat.
- 3) Mencegah masalah kemamilan, sebab pasangan yang memiliki rhesus darah berbeda dapat menimbulkan masalah kehamilan.

Adapun manfaat mengetahui jenis golongan darah yang kita miliki adalah jika suatu saat berencana untuk mendonorkan darah atau membutuhkan transfuse darah, sudah diketahui jenis golongan darah yang sesuai dan juga untuk kebutuhan identifikasi pada kasus kedokteran forensik karena jika menerima golongan darah yang tidak sesuai dapat menyebabkan komplikasi.

Tabel 21 - Jumlah penduduk menurut golongan darah													
Kecamatan	GOLONGAN DARAH												
	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU
KOTA WAINGAPU	1.909	2.824	626	5.320	10	5	19	8	7	4	22	58	26.389
HAHARU	96	142	34	222	3	0	0	0	1	3	7	11	6.694
LEWA	364	582	128	1.182	1	2	3	1	3	2	9	26	15.495
NGGAHA ORI ANGU	220	262	65	449	0	0	0	1	0	3	3	16	10.118
TABUNDUNG	148	275	87	377	0	0	1	0	0	0	0	8	9.452
PINU PAHAR	49	105	35	140	1	1	0	0	1	1	6	20	7.776
PANDAWAI	283	746	144	921	0	0	6	1	2	2	7	35	17.967
UMALULU	246	515	102	782	4	1	11	2	1	7	11	35	18.723
RINDI	75	162	40	326	1	2	2	3	0	0	1	19	10.763
PAHUNGA LODU	164	348	63	523	1	1	5	2	0	1	9	17	14.019
WULLA WAIJILU	82	185	30	221	1	1	2	1	1	2	4	7	8.392
PABERIWAI	61	98	14	107	3	1	0	0	3	0	2	17	6.768
KARERA	72	137	23	199	0	0	3	3	2	2	1	13	8.541
KAHAUNGU ETI	111	140	48	260	3	0	0	1	3	1	2	8	9.958
MATAWAI LA PAWU	55	95	24	141	0	0	2	1	0	0	3	16	6.814
KAMBERA	1.525	3.174	579	4.034	8	1	5	9	7	6	21	81	26.977
KAMBATA MAPAMBUHANG	56	73	18	100	0	0	0	0	0	1	0	4	4.257
LEWA TIDAHU	101	153	40	305	0	1	2	0	2	0	7	8	7.658
KATALA HAMU LINGU	68	129	25	155	0	0	0	0	1	0	2	3	4.269
KANATANG	446	552	111	992	5	0	3	1	4	0	6	17	10.334
NGADU NGALA	43	85	17	98	0	0	1	0	0	1	4	9	5.734
MAHU	18	35	3	65	0	0	0	0	0	1	1	6	5.083
TOTAL	6.192	10.817	2.256	16.919	41	16	65	34	38	37	128	434	242.181

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025

Dari *Tabel 21* tersebut jelas terlihat bahwa secara keseluruhan pada 22 Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur sebagian besar penduduk bergolongan darah O sebesar 16.919 jiwa (6,1%), disusul oleh penduduk bergolongan darah B sebesar 10.817 jiwa (3,9%), golongan darah A sebesar 6.192 jiwa (2,2%) dan paling sedikit adalah yang bergolongan darah AB yaitu sebesar 2.256 jiwa (0,8%). Setiap golongan darah A, B, AB, dan O mempunyai Rhesus Positif maupun negatif seperti Golongan Darah A-, AB+, A+, B-, B+, AB-, O+, O-. Golongan Darah Rhesus hanya mengindikasikan ada atau tidaknya protein Rhesus dalam darah.

d. Kasus gizi buruk dan gizi kurang dan Ibu Hamil kekurangan Gizi

Gizi Buruk adalah kekurangan energy dan protein (KEP) tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu yang lama yang ditandai dengan status gizi sangat buruk. Sedangkan masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi) dan lain-lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur (pada 24 Puskesmas) dalam Semester Pertama Tahun 2025, kasus gizi buruk di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 293 jiwa, tersebar di 19 kecamatan. Kasus gizi buruk terbesar berada di Kecamatan Kambera sebesar 59 kasus, disusul Kecamatan Pahunga Lodu sebesar 54 kasus dan ada 3 Kecamatan yang bebas gizi buruk yaitu Kecamatan Kambata Mapa Mbuhang, Ngadu Ngala dan Mahu. Secara keseluruhan kasus gizi buruk mengalami penurunan sebanyak 35 kasus dibandingkan dengan keadaan Tahun 2024.

Untuk Kasus Gizi Kurang, ada 2.885 kasus di Kabupaten Sumba Timur yang juga tersebar di 22 kecamatan. Kasus terbesar terdapat di Kecamatan Pahunga Lodu dengan 273 kasus, disusul Kecamatan Kahaungu Eti 264 kasus dan yang kasusnya paling sedikit/kecil terdapat di Kecamatan Kambata Ma Mbuhang dengan 9 kasus. Secara keseluruhan mengalami penurunan sebanyak 611 kasus dibanding dengan tahun 2024.

Untuk kasus Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (BUMIL KEK) ada 1.187 kasus yang juga tersebar di 22 Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, dan kasus terbesar ada di Kecamatan Pahunga Lodu yaitu 115 kasus, disusul Kecamatan Umalulu sebanyak 103 kasus, sedangkan kasus terkecil ada pada Kecamatan Kambata Mapa Mbuhang yaitu sebanyak 4 kasus.

Sedangkan untuk kasus ibu melahirkan meninggal terdapat 6 kasus. Penyebab Ibu melahirkan meninggal, adalah karena pendarahan, Pre Eklamsia dan kelainan pembekuan darah (Koagolopati)

Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita disuatu daerah.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengurangi terjadinya kematian bayi dan kematian ibu melahirkan adalah :

- Adanya kegiatan pendampingan dokter ahli pada 24 Puskesmas tentang penanganan pendarahan, asfiksia (kekurangan oksigen pada otak), pendalaman skrining Pre Eklamsia, tanda – tanda bahaya pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, skrining pada bayi baru lahir

- Puskesmas harus mengirim video real emergency tiap minggu yang akan diperiksa oleh dokter ahli dan Dinas Kesehatan
- Pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh Puskesmas
- Pelatihan menggunakan alat medis
- Workshop tentang afiksia Bersama dokter ahli.

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam menangani kasus stunting dan gizi buruk antara lain:

1. Program Gerakan Orang tua Asuh adalah gerakan bersama yang menjadi tanggung jawab pribadi para pejabat pemerintahan di Kabupaten Sumba Timur untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting dan gizi buruk.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam tanaman apotik hidup.
3. Peningkatan gizi anak melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Dengan adanya kasus-kasus seperti tersebut diatas, diharapkan peranan pemerintah untuk menaggulangi kondisi tersebut dengan terus membuat program dan kegiatan yang berpihak pada masyarakat khususnya dalam hal meningkatkan derajat kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

e. Kematian (Mortalitas)

- a) **Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate/NNDR) dan Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/Post Neo Natal Death Rate/PNNDR)**

Kematian Neonatal atau Kematian Endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Kematian Neonatal atau Kematian Endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan. Sedangkan Kematian Post Neo Natal adalah kematian yang terjadi pada bayi berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun

Tabel 22 - Angka Kematian Neonatal (NNDR) dan Post Neo Natal

Kecamatan	Kelahiran Hidup	Kematian Neonatal	AK Neonatal / NNDR	Kematian Post Neonatal	AK Post Neonatal/ PNNDR
Kota Waingapu	217	4	18,43	0	0
Haharu	69	0	0	1	14,49
Lewa	140	0	0	2	14,28

Kecamatan	Kelahiran Hidup	Kematian Neonatal	AK Neonatal / NNDR	Kematian Post Neonatal	AK Post Neonatal/ PNNDNR
Nggaha Ori Angu	107	0	0	0	0
Tabundung	80	2	25	0	0
Pinu Pahar	65	1	15,38	0	0
Pandawai	162	1	6,17	2	12,34
Umalulu	174	2	11,49	0	0
Rindi	116	1	8,62	5	43,1
Pahunga Lodu	159	1	6,28	1	6,28
Wulla Waijilu	81	1	12,34	0	0
Paberiwai	58	2	34,48	0	0
Karera	66	1	15,15	0	0
Kahaungu Eti	126	0	0	1	7,93
Matawai La Pawu	44	2	45,45	0	0
Kambora	257	6	23,34	0	0
Kambata Mapambuhang	40	1	25	0	0
Lewa Tidahu	57	1	17,54	0	0
Katala Hamu Lingu	50	5	100	0	0
Kanatang	123	0	0	0	0
Ngadu Ngala	68	2	29,41	0	0
Mahu	50	0	0	0	0
TOTAL	2,309	33	14,29	12	5,19
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025					

Dalam Tabel 22 menunjukkan bahwa dari 1000 bayi kelahiran hidup Semester Pertama Tahun 2025 terjadi Kematian Neonatal sebanyak 33 bayi atau terdapat 14 Angka Kematian Neonatal dari 1000 bayi kelahiran hidup, dan terjadi kematian Post Neonatal sebanyak 12 kasus dengan Angka Kematian Post Neo Natal sebanyak 5 bayi dari 1000 bayi kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi sedikit penurunan bayi baru lahir meninggal (Neonatal)

b) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 selama tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, bahwa pada tenggang waktu Semester Pertama 2025 terdapat kematian Balita di wilayah Kabupaten Sumba Timur sebanyak 43 (empat puluh tiga) balita. Dibandingkan dengan

keadaan Semester Pertama Tahun 2024, ada peningkatan kematian Balita di wilayah Kabupaten Sumba Timur.

Tabel 23 - Angka Kematian Balita			
Kecamatan	Penduduk Usia 0-4 tahun pada pertengahan tahun	Kematian Balita (0-4 tahun)	Angka Kematian Balita (AKABA)
Kota Waingapu	1,872	0	0
Haharu	375	1	2,66
Lewa	897	2	2,22
Nggaha Ori Angu	604	0	0
Tabundung	369	2	5,42
Pinu Pahar	356	3	8,42
Pandawai	1,119	4	3,57
Umalulu	937	2	2,13
Rindi	469	6	12,79
Pahunga Lodu	692	2	2,89
Wulla Waijilu	444	1	2,25
Paberiwai	312	2	6,41
Karera	378	1	2,64
Kahaungu Eti	537	0	0
Matawai La Pawu	295	2	6,77
Kambera	1,760	6	3,4
Kambata Mapambuhang	246	1	4,06
Lewa Tidahu	402	1	2,48
Katala Hamu Lingu	223	5	22,41
Kanatang	710	0	0
Ngadu Ngala	250	2	8
Mahu	279	0	0
TOTAL	13,526	43	3,17
Sumber Data: DKB Dukcapil dan DinKes Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025			

Dari Tabel tersebut di atas terlihat bahwa Angka Kematian Balita (AKABA) adalah sebesar 3,17 yang artinya bahwa pada Semester Pertama Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Timur terjadi kasus kematian balita sebanyak 3 Balita di antara 1000 balita yang hidup.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun kehidupan seseorang. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan umumnya juga dijadikan tolak ukur kualitas hidup seseorang.

➤ **Angka Putus Sekolah (APS)**

Realitasnya masih saja ada orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan bagi anaknya. Setiap tahun ada saja anak yang putus dan menjadi masalah yang cukup serius untuk perhatian Pemerintah terus gencar untuk memajukan pendidikan nasional. Anak putus sekolah adalah permasalahan pendidikan yang merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya sehingga tidak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu kemampuan berpikir yang dimiliki anak, latar belakang pendidikan orang tua yang kurang memahami pentingnya pendidikan, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lemahnya ekonomi keluarga, kurangnya motivasi dan minat anak untuk bersekolah, anak mengidap penyakit atau penyandang disabilitas, tinggal di tempat terpencil jauh dari tempat bersekolah dan juga kondisi lingkungan anak.

Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, jumlah siswa putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP keadaan 30 Juni 2025 :

Tabel 24 - Angka Putus Sekolah (APS)			
Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Murid Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APS)
SD	33.396	1.130	3,38 %
SLTP	16,316	1.163	7,12 %
Jumlah	49,712	2.293	10,5 %
Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025			

Dari Tabel tersebut di atas, terlihat bahwa angka putus sekolah pada tingkat pendidikan SD sebesar 3,38 % sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP sebesar 7,12%.

Dengan demikian maka terlihat bahwa Angka Putus Sekolah terbesar pada tingkat pendidikan SLTP.

➤ **Angka Partisipasi Kasar**

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar.

Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Dalam hal ini meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang Pendidikan.

Adapun Angka Partisipasi Kasar pada tingkat Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 25 - Angka Partisipasi Kasar (APK)			
Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD	33.396	34,357	97,20 %
SLTP	16,316	17,724	92,05 %
Jumlah	49,712	52,081	95,45 %
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025			

Tabel diatas terlihat bahwa untuk setiap jenjang pendidikan dibawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa anak usia sekolah baik tingkat SD maupun SMP bersekolah sesuai dengan usia standar pada jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan atau yang sesuai dengan standar kelompok umur.

➤ **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat Pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indicator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang Pendidikan. Namun APM merupakan indicator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM

melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang Pendidikan sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Tabel 26 - Angka Partisipasi Murni (APM)			
Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)
SD	33.396	34,357	97,20 %
SLTP	16,316	17,724	92,05 %
Jumlah	49,712	52,081	95,45 %
Sumber Data: Dinas Pendidikan dan DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025			

Pada Tabel diatas terlihat bahwa untuk jenjang Pendidikan SD/Sederajat adalah 97,20% yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada 97 anak yang bersekolah di bangku SD/Sederajat.

Sedangkan di bangku SLTP/Sederajat ada 92,05% yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun ada 92 orang yang bersekolah di SLTP/Sederajat.

3. Ekonomi

- 1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan menganggur/Pencari Kerja)

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga Kerja (Manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Berdasarkan DKB Semester Pertama Tahun 2025, maka jumlah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) sebesar 188.237 jiwa. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Cara Menghitung Persentase Tenaga Kerja :

- Jumlah penduduk usia kerja (15-64) tahun : 188.237 jiwa
- Jumlah penduduk : 279.158 jiwa

Persentase Tenaga Kerja di Kabupaten Sumba Timur sebesar :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia Kerja 15–64 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

$$\frac{188.237}{279.158} \times 100 = 67,4\%$$

Persentase Tenaga Kerja di Kabupaten Sumba Timur pada pertengahan Tahun 2025 (keadaan 30 Juni 2025) adalah sebesar 67,4%, yang berarti di setiap 100 penduduk ada 67 jiwa yang merupakan usia kerja.

Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran kerja juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan kerja, maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula.

Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut Kelompok pekerjaan menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut kelompok pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut kelompok pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja disuatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Tabel 27 - Jumlah Penduduk menurut Kelompok Pekerjaan

Kecamatan	BELUM / TIDAK BEKERJA	APARATUR / PEJABAT NEGARA	TENAGA PENGAJAR	WIRA SWASTA	PERTANI AN / PETER NAKAN	NELA YAN	AGAMA DAN KEPER CAYAAN	PELAJAR / MAHA SISWA	TENAGA KESE HATAN	PENSII WAN	LAIN NYA
KOTA WAINGAPU	10.445	1.758	402	2.150	4.032	707	73	10.084	100	674	6.776
HAHARU	1.875	53	16	66	2.787	10	5	2.009	5	15	372
LEWA	4.212	185	110	224	6.156	1	22	5.416	18	81	1.373
NGGAHA ORI ANGU	2.682	46	20	84	4.708	0	10	3.083	3	13	488
TABUNDUNG	2.432	57	31	90	4.513	0	7	2.760	6	28	424
PINU PAHAR	1.899	29	14	49	3.588	0	5	2.226	3	8	314
PANDAWAI	5.170	173	81	248	7.577	81	36	5.653	10	61	1.024
UMALULU	4.958	195	99	477	7.794	71	26	5.506	24	61	1.229
RINDI	2.704	86	25	107	4.560	150	9	3.233	2	13	505
PAHUNGA LODU	3.822	133	50	130	6.082	57	10	4.232	4	40	593
WULLA WAIJILU	2.368	71	39	61	3.582	10	16	2.382	8	18	374

Kecamatan	BELUM / TIDAK BEKERJA	APARATUR / PEABAT NEGARA	TENAGA PENGAJAR	WIRA SWASTA	PERTANI AN / PETER NAKAN	NELA YAN	AGAMA DAN KEPER CAYAAN	PELAJAR / MAHA SISWA	TENAGA KESE HATAN	PENSU IAN	LAIN NYA
PABERIWAI	1.693	37	25	57	2.729	0	4	2.204	0	16	309
KARERA	2.369	37	25	87	3.259	221	11	2.380	3	13	591
KAHAUNGU ETI	2.806	32	14	74	4.340	0	13	2.851	4	2	399
MATAWAI LA PAWU	1.786	40	13	59	2.840	0	8	1.989	1	5	410
KAMBERA	9.573	1.434	359	1.007	8.495	35	63	10.237	70	530	4.624
KAMBATA MAPAMBUHANG	1.157	7	7	24	1.597	0	1	1.288	3	1	424
LEWA TIDAHU	1.805	46	27	56	3.270	1	8	2.620	2	8	434
KATALA HAMU LINGU	1.226	23	9	24	1.822	0	1	1.253	1	4	289
KANATANG	3.072	267	94	205	3.178	61	13	3.785	14	50	1.732
NGADU NGALA	1.383	21	13	29	2.718	0	8	1.649	1	4	166
MAHU	1.548	14	2	21	2.234	0	3	1.291	1	2	96
TOTAL	70.985	4.744	1.475	5.329	91.861	1.405	352	78.131	283	1.647	22.946

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025

Pada Tabel 27, menunjukkan bahwa Persentasi tertinggi dari kelompok pekerjaan penduduk Kabupaten Sumba Timur terletak pada kelompok pekerjaan Pertanian/Peternakan sebanyak 91.861 jiwa (32,9%), disusul urutan kedua kelompok pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 78.131 jiwa (27,98%) dan urutan ketiga Belum/Tidak bekerja sebanyak 70.985 jiwa (25,42%).

Menurut data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur, untuk keadaan Semester Pertama (per 30 Juni 2025) Jumlah penduduk pencari kerja yang terdaftar berdasarkan pendidikan sebanyak 294 orang dengan perincian :

- SD sebanyak 104 orang : Laki-laki 1 orang, Perempuan 103 orang
- SLTP sebanyak 70 orang : Laki-laki 1 orang, Perempuan 69 orang
- SLTA sebanyak 106 orang : Laki-laki 15 orang, Perempuan 91 orang
- SMK sebanyak 9 orang : Laki-laki 1 orang, Perempuan 8 orang
- D-III sebanyak 3 orang : Perempuan 3 orang
- SI sebanyak 2 orang : Perempuan 2 orang

Sedangkan jumlah penduduk pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Transnaker berdasarkan kelompok umur sebanyak 294 orang.

Ada 158 calon pekerja antar negara yang terdaftar pada Dinas Transnaker. Tenaga Kerja Indonesia ini bekerja di 3 (tiga) Negara yaitu, Malaysia, Singapura dan Hongkong.

Adapun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) antar negara sebanyak 17 (tujuh belas) Perusahaan adalah :

⇒ PT. Maharani Tri Utama Mandiri, PT. Genta Karya Sejahtera, PT. Gasindo Buana Sari, PT. Arny Family, PT. Bhakti Unggul Sejahtera, PT. Prima Duta Sejati, PT. Alam Permai Indonesia, PT. Falia Sinatrya Sejati, PT. Esdema Mandiri, PT. Citra Dato Perkasa, PT. Okdo Harapan Mulia, PT. Bahrindo Mahdi, PT. Baham Put ra Abadi, PT. Rizaldy Bina Bersama, Sariwanti Agung, PT. Alam Permai Indonesia, PT. Sugih Jaya Sentosa.

Selain Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, ada juga Perusahaan penyalur tenaga kerja antar daerah sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu :

⇒ PT. Karya Abadi Timur, PT. Genta Gemilang Abadi, PTdd. Asisten rumah Indonesia, PT. Argo Abadi Cemerlang, PT. Kharisma Inti Usaha, PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa, PT. Pusat Pelatihan Chava, PT. Sekar Nirwana Indonesia.

Selain calon pekerja antar negara, ada juga calon pekerja antar daerah terdapat pada Dinas Transnaker Kabupaten Sumba Timur yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur / Pencari Kerja)

Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dengan mendaftarkan diri pada pelaksana penempatan kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Wilayah kerjanya selain antar negara juga antar daerah di Indonesia.

Adapun data pencari kerja keadaan Semester Pertama per 30 Juni 2025 yang diperoleh dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur, sebagai berikut :

- Penduduk pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang terdaftar sebanyak 294 jiwa dengan rincian :
 - ☞ SD sebanyak 104 orang : Laki-laki 1 orang, Perempuan 103 orang
 - ☞ SLTP sebanyak 70 orang : Laki-laki 1 orang, Perempuan 69 orang
 - ☞ SLTA sebanyak 106 orang : Laki-laki 15 orang, Perempuan 91 orang
 - ☞ SMK sebanyak 9 orang : Laki-laki 1 orang, Perempuan 8 orang
 - ☞ Diploma III sebanyak 3 orang : Perempuan 3 orang
 - ☞ Sarjana (S1) sebanyak 2 orang : Perempuan 2 orang

- Penduduk pencari kerja berdasarkan golongan umur yang terdaftar sebanyak 294 jiwa dengan perincian :

- ☞ Umur 15-19 tahun : 42 orang
- ☞ Umur 20-29 tahun : 140 orang
- ☞ Umur 30-44 Tahun : 111 orang
- ☞ Umur 45-54 Tahun : 1 orang

Sebagian besar pencari kerja ini berusia 20-29 tahun sebanyak 140 orang, disusul berusia 30-44 tahun sebanyak 111 orang dan yang berusia 15-19 tahun sebanyak 42 orang dan paling sedikit yang berumur 45-54 yaitu hanya 1 orang.

- Persentase Pekerja Anak (<15 Tahun)

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah.

Khusus di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk keadaan Semester Pertama Tahun 2025 tidak ada pekerja anak usia sekolah (SD) dibawah umur 15 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak-anak pada usia tersebut lebih mementingkan pendidikan daripada mencari pekerjaan.

2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 28 - Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Kelompok Umur	Tenaga Kerja	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	APAK
		Pencari Kerja	Bekerja	Angkatan Kerja		
15-19	29.003	2.960	135	3.095	25.908	10,67
20-24	26.680	4.141	2.289	6.430	20.250	24,1
25-29	24.681	6.015	8.609	14.624	10.057	59,25
30-34	20.865	4.285	12.651	16.936	3.929	81,17
35-39	19.639	1.904	15.887	17.791	1.848	90,59
40-44	17.674	725	14.957	15.682	1.992	88,73
45-49	15.782	363	13.470	13.833	1.949	87,65
50-54	13.693	179	11.613	11.792	1.901	86,12
55-59	11.146	107	9.553	9.660	1.486	86,67
60-64	9.074	68	7.487	7.555	1.519	83,26
Jumlah	188.237	20.747	96.651	117.398	70.839	62,37
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025						

Hasil perhitungan pada Tabel 28 diperoleh APAK Kabupaten Sumba Timur sebesar 62,37% penduduk usia 15-64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat mencari pekerjaan. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa penduduk yang berumur 15-19 tahun mempunyai APAK paling rendah, sedangkan penduduk berumur 35-39 memiliki APAK paling tinggi.

4. Sosial

1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau sekelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau memiliki gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Semester Pertama Tahun 2025, yakni :

- Anak terlantar sebanyak 100 orang, laki-laki 35 orang Perempuan 65 orang
- Anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 57 orang, laki-laki 21 orang Perempuan 35 orang
- Anak jalanan sebanyak 25 orang, laki-laki 22 orang, Perempuan 3 orang
- Ex Narapidana 44 orang, laki-laki 42 orang, perempuan 2 orang
- Lanjut Usia terlantar sebanyak 29.744 orang, laki-laki : 15.864

- orang, Perempuan : 13.880 orang
- Korban bencana alam 76 orang, laki-laki 58 orang, perempuan 18 orang
- Keluarga Fakir Miskin sebanyak 49.726 KK
- Korban Kebakaran rumah 13 KK, laki-laki 11 KK, perempuan 2 KK
- Korban Banjir 15 KK, laki-laki 10 KK, perempuan 5 KK
- Komunitas Adat Terpencil 17 KK, laki-laki 16 KK, perempuan 1 KK
- Korban angin puting beliung 44 KK, laki-laki 35 KK, perempuan 9 KK
- Penyandang cacat Fisik 753 orang, laki-laki 447 orang, perempuan 306 orang
- Penyandang Cacat Mental 349 orang, laki-laki 184 orang, perempuan 165 orang
- Penerima PKH 21.410 jiwa, laki-laki 4.956 orang, perempuan 16.454 orang
- Wanita Rawan Sosial berjumlah 25 orang
- Penyandang cacat sensorik sebanyak 798 orang, laki-laki 469, perempuan 329 orang
- Korban bencana sosial , perempuan sebanyak 1 orang

2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pengertian PSKS pada dasarnya mencakup :

- Potensi Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi dan Lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan diberbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat di dayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial
- Sumber Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi dan Lembaga yang telah memiliki kemampuan dan atau telah memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Upaya untuk mengatasi dan mengurangi penduduk penyandang

masalah kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial, telah membentuk Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Adapun Jenis-jenis PSKS yaitu :

- Panti Sosial Anak dan remaja, yang menampung penduduk yang sudah tidak mempunyai orang tua sebanyak 166 orang, laki-laki : 80 orang Perempuan : 86 orang
- Panti Cacat, yang menampung penduduk cacat sebanyak 60 orang, laki-laki 31 orang Perempuan 29 orang.
- Tagana sebagai tenaga lapangan sebanyak 40 orang, laki-laki 29 orang, perempuan 11 orang.
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 22 orang, laki-laki 20 orang, perempuan 2 orang
- LSM Nasional berjumlah 50 Lembaga.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait PSKS dan PMKS:

- a. Memberikan layanan sosial langsung kepada PSKS dan PMKS yang meliputi akses layanan alat bantu, akses layanan ke layanan kesehatan (pemberian rekomendasi JKN KIS), akses ke layanan pendidikan (memfasilitasi PPKS untuk mengikuti pelatihan kerja di Sentra Efata).
- b. Memberdayakan ekonomi melalui pemberian bantuan usaha perorangan maupun kelompok.

3) Proporsi Penduduk Miskin

Konsep kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda, Kemiskinan didefinisikan sebagai penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan (Rp.443.502,- per kapita per bulan), sedangkan Kemiskinan Ekstrem dengan pendapatan dibawah US\$ 1,99 PPP (Purchasing Power Parities). Pada Tahun 2024 nilai US \$ 1,9 PPP = 347.130 per kapita per bulan.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2024 adalah :

1. Mengurangi beban pengeluaran
2. Meningkatkan pendapatan
3. Meminimalkan kantong kemiskinan

Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :

- Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh program perlindungan sosial
- Memastikan komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah
- Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas dan lansia
- Melibatkan multipihak ; Komunitas, universitas, swasta dan media
- Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terkait Pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan (NIK, SKta Kelahiran, dsb)

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur masih lebih fokus pada mengurangi beban pengeluaran dibandingkan meningkatkan pendapatan. Untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan, sehingga masyarakat miskin dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka Panjang.

Data yang diperoleh dari Sumber BPS Sumba Timur Tahun 2024 Kabupaten Sumba Timur bahwa penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur keadaan Tahun 2024 adalah sebanyak 73.580 jiwa

4) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti salah satunya kesehatan. Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk biasanya dipenuhi melalui jaminan kesehatan baik bagi penduduk miskin maupun yang bekerja (mampu secara finansial) dan biasanya dipenuhi melalui Asuransi Kesehatan, seperti BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Data yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Waingapu bahwa pemanfaat BPJS yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) keadaan 30 Juni 2024 sebanyak

236.600 jiwa (84,8%) yang berasal dari sumber dana APBN sebanyak 216.874 jiwa (77,7%), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sumber dana APBD/ Jamkesda Kabupaten Sumba Timur sebanyak 19.726 jiwa (7,1%). Sedangkan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) sebanyak 52.433 jiwa (18,8%) yang terdiri dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri, Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Bukan Pekerja.

Dalam pelayanannya BPJS bekerja sama dengan 4 (empat) Rumah Sakit yang ada di Kota Waingapu, klinik sebanyak 4 (empat) buah dan 24 Puskesmas yang tersebar pada 22 Kecamatan dengan dibantu oleh Dokter Praktek Perorangan (DPP) sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) Optik yaitu Optik Internasional.

Menurut data yang diperoleh dari Website BPS Kabupaten Sumba Timur, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2024 adalah 73.580 jiwa atau 26,4%.

Rumus menghitung Jumlah penduduk miskin penerima Jamkeskin adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Penduduk Miskin} = \sum \frac{\text{Penduduk Miskin Penerima Jamkes}}{\text{Penduduk Miskin}} \times 100$$

$$\% \text{ Penduduk Miskin} = \sum \frac{236.600}{73.580} \times 100 = 321,55\%$$

Menurut penjelasan dari BPJS Cabang Waingapu Jumlah penduduk miskin penerima jamkeskin lebih besar dari Jumlah penduduk miskin dikarenakan ada penduduk yang mendaftar untuk di masukkan dalam kategori penduduk miskin (Kelas III) untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah.

C. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk seperti perbedaan sumber daya tiap daerah. Penduduk melakukan mobiltas untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tersedia di wilayah asal mereka, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti pekerjaan. Mobilitas penduduk mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam hal laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah dan juga mempunyai peran dalam pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan.

Terdapat dua tipe mobilitas penduduk yang biasa dilakukan, yaitu mobilitas permanen yang biasa juga disebut migrasi, dan mobilitas non permanen. Ke dua tipe mobilitas ini berpengaruh positif ataupun negatif di daerah asal maupun daerah tujuan.

a. Mobilitas Permanen (migrasi)

Mobilitas permanen yang biasa juga disebut dengan migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah administratif, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain dengan tujuan untuk menetap.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik, yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik terdapat pula faktor antara yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tempat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan lain sebagainya, contohnya Transmigrasi.

Jumlah penduduk yang pindah Keluar dari Kabupaten Sumba Timur untuk Semester Pertama Tahun 2025 sebanyak 112 jiwa dan jumlah penduduk yang pindah datang ke Kabupaten Sumba Timur sebanyak 96 jiwa.

b. Mobilitas Non Permanen

Adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan/upah yang lebih besar di tempat yang didatangi karena di daerah asal, lowongan pekerjaan sedikit dan juga upahnya rendah.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal pengurusan dokumen kependudukan sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk lebih tertib administrasi kependudukannya. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat bagi kepentingan administrasi serta pelayanan publik lainnya, seperti di bidang pendidikan, Kesehatan, Pertanian, perbankan dan sosial lainnya.

A. Kepemilikan Akta Kelahiran

Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak. Semakin tidak jelas identitas anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja anak dibawah umur dan kekerasan terhadap anak.

Akta adalah suatu bukti tentang peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan telah dicatat serta dibukukan.

Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan suatu hal yang penting karena merupakan dokumen yang berisi pengakuan dan perlindungan negara berupa identitas awal penduduk.

Semua anak ataupun penduduk dapat dilakukan pencatatan kelahirannya. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat Universal karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh

kembang anak. Data cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia anak 0-5 Tahun, 0-17 Tahun sudah cukup meningkat walaupun belum mencapai target nasional. Sedangkan untuk kepemilikan Akta Kelahiran Umum masih jauh dari yang diharapkan atau belum optimal walaupun dari data terlihat bahwa setiap tahun ada peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang sudah mulai memahami manfaat dari memiliki Akta Kelahiran, karena berkaitan dengan pengurusan harta warisan. Setiap tahun ada peningkatan persentase kepemilikan Akta Kelahiran. Baik untuk Akta Kelahiran Anak Usia 0-5 Tahun 0-17 Tahun maupun Akta Kelahiran Umum.

Merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mendorong masyarakat melalui sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media sosial ataupun melakukan pelayanan keliling dan jemput bola untuk mengoptimalkan pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas layanan Admuduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur juga telah melakukan terobosan dengan menciptakan INOVASI SIDARLIN (SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN ONLINE) yang merupakan pelayanan dokumen kependudukan secara online dengan tidak perlu mendatangi Dinas Dukcapil untuk mengurus dokumen, cukup mengurusnya sendiri secara online dari rumah (mandiri) atau darimana saja yang memiliki jaringan internet ataupun dengan mendatangi Kantor Desa/Kelurahan yang sudah menggunakan Aplikasi SIDARLIN untuk mengurus dokumen kependudukan seperti pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain-lain.

Adapun data kepemilikan Akta Kelahiran dapat dilihat dalam Tabel 29 di bawah ini, yang mana data tersebut adalah data kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-5 Tahun, usia 0-17 tahun dan Akta kelahiran Umum.

Kecamatan	Jlh Anak Usia 0-5 (31 Des 2024)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jlh Anak Usia 0-5 (30 Juni 2025)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Kota Waingapu	2.923	2.886	98,73	2.547	2.528	99,25
Haharu	592	575	97,13	520	514	98,85
Lewa	1.383	1.361	98,41	1.238	1.225	98,95
Nggaha Ori Angu	957	938	98,01	825	811	98,30
Tabundung	684	648	94,74	553	537	97,11
Pinu Pahar	584	514	88,01	509	456	89,59
Pandawai	1.692	1.660	98,11	1.547	1.521	98,32
Umalulu	1.520	1.489	97,96	1.331	1.317	98,95

Kecamatan	Jlh Anak Usia 0-5 (31 Des 2024)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jlh Anak Usia 0-5 (30 Juni 2025)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Rindi	844	826	97,87	686	678	98,83
Pahunga Lodu	1.243	1.134	91,23	1.021	952	93,24
Wulla Waijilu	688	674	97,97	626	618	98,72
Paberiwai	548	527	96,17	455	443	97,36
Karera	662	628	94,86	548	532	97,08
Kahaungu Eti	912	863	94,63	795	769	96,73
Matawai La Pawu	496	477	96,17	429	420	97,90
Kambera	2.689	2.629	97,77	2.411	2.370	98,30
Kambata Mapambuhang	382	355	92,93	329	309	93,92
Lewa Tidahu	669	653	97,61	583	573	98,28
Katala Hamu Lingu	375	367	97,87	301	296	98,34
Kanatang	1.083	1.057	97,60	957	945	98,75
Ngadu Ngala	450	426	94,67	380	365	96,05
Mahu	461	439	95,23	411	394	95,86
TOTAL	21.837	21.126	96,74	19.002	18.573	97,74
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.						

Dari Tabel 29 terlihat bahwa berdasarkan DKB Semester Pertama Tahun 2025 ada peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 1.15% dalam 6 (enam) bulan pertama Tahun 2025 jika dibandingkan dengan keadaan Semester dua Tahun 2024 (31 Desember 2024). Hal itu menandakan bahwa sebagian besar anak berusia 0-5 tahun telah memiliki Akta Kelahiran, terlihat bahwa persentase terbesar kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-5 Tahun berada pada Kecamatan Kota Waingapu sebanyak 2.528 kutipan (99,25%), disusul Kecamatan Lewa sebanyak 1.225 kutipan (98,95%), Kecamatan Kanatang sebanyak 945 kutipan (98,75%), sedangkan kepemilikan terendah di Kecamatan Pinu Pahar sebanyak 456 kutipan (89,59%).

Tabel 30 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun

Kecamatan	Jlh Anak Usia 0-17 (31 Des 2023)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jlh Anak Usia 0-17 (30 Juni 2024)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Kota Waingapu	1.486	97,25	1.463	1.435	98,09	1.486
Haharu	4.076	96,43	4.098	3.983	97,19	4.076
Lewa	1.906	93,61	1.950	1.832	93,95	1.906
Nggaha Ori Angu	1.941	94,45	2.052	1.945	94,79	1.941
Tabundung	86.723	95,10	88.680	85.162	96,03	86.723

Kecamatan	Jlh Anak Usia 0-17 (31 Des 2023)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jlh Anak Usia 0-17 (30 Juni 2024)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Pinu Pahar	1.486	97,25	1.463	1.435	98,09	1.486
Pandawai	4.076	96,43	4.098	3.983	97,19	4.076
Umalulu	1.906	93,61	1.950	1.832	93,95	1.906
Rindi	1.941	94,45	2.052	1.945	94,79	1.941
Pahunga Lodu	86.723	95,10	88.680	85.162	96,03	86.723
Wulla Wajilu	1.486	97,25	1.463	1.435	98,09	1.486
Paberiwai	4.076	96,43	4.098	3.983	97,19	4.076
Karera	1.906	93,61	1.950	1.832	93,95	1.906
Kahaungu Eti	1.941	94,45	2.052	1.945	94,79	1.941
Matawai La Pawu	86.723	95,10	88.680	85.162	96,03	86.723
Kambara	1.486	97,25	1.463	1.435	98,09	1.486
Kambata Mapambuhang	4.076	96,43	4.098	3.983	97,19	4.076
Lewa Tidahu	1.906	93,61	1.950	1.832	93,95	1.906
Katala Hamu Lingu	1.941	94,45	2.052	1.945	94,79	1.941
Kanatang	86.723	95,10	88.680	85.162	96,03	86.723
Ngadu Ngala	1.486	97,25	1.463	1.435	98,09	1.486
Mahu	4.076	96,43	4.098	3.983	97,19	4.076
TOTAL	1.906	93,61	1.950	1.832	93,95	1.906

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.

Dari Tabel 30 terlihat bahwa Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun berdasarkan DKB Semeter Pertama Tahun 2025 sebanyak 85,162 kutipan (96,03%) dari 91.189 anak usia 0-17 tahun. Ada peningkatan persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran walaupun kecil sebesar 0,98% dalam 6 (enam) bulan pertama di Tahun 2025 jika dibandingkan dengan keadaan Semester dua Tahun 2024 (31 Desember 2024). Hal itu menandakan bahwa sebagian besar anak berusia 0-17 tahun telah memiliki Akta Kelahiran. Pemerintah tetap berharap agar semua anak khususnya di Kabupaten Sumba Timur telah memilik Akta Kelahiran mengingat betapa pentingnya memiliki Akta Kelahiran. Terlihat bahwa persentase terbesar kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17 tahun di Kecamatan Kota Waingapu sebanyak 11.077 kutipan (98,09%), disusul Kecamatan Umalulu sebanyak 6.310 kutipan (97,98%), Kecamatan Kambara sebanyak 10.672 kutipan (97,45%), sedangkan kepemilikan terendah di Kecamatan Pinu Pahar sebanyak 2.438 kutipan (91,83%).

Secara umum, persentase kepemilikannya sudah cukup baik walaupun belum memenuhi target. Artinya masih banyak anak-anak usia 0 -17 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran (6.027 anak). Untuk itu diperlukan juga dukungan pihak RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk terus menghimbau masyarakatnya untuk segera melaporkan dan

mendaftarkan peristiwa penting atas kelahiran anak yang dialami dan anak-anak usia sekolah yang belum memiliki Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat/diregistrasi secara hukum untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran. Ada beberapa resiko atau akibat jika tidak memiliki Akta Kelahiran, antara lain : Kesulitan mendapat akses Pendidikan formal, memicu terjadinya perkawinan anak di bawah umur, meningkatnya pekerja anak, adopsi ilegal, perdagangan anak, dalam hal pembagian warisan dan lain-lain.

Tabel 31 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Umum

Kecamatan	Jumlah Penduduk (31 Des 2024)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jumlah Penduduk (30 Juni 2025)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Kota Waingapu	37.012	20.948	56,60	37.201	21.434	57,62
Haharu	7.151	3.946	55,18	7.213	4.041	56,02
Lewa	17.652	9.677	54,82	17.798	9.923	55,75
Nggaha Ori Angu	11.101	6.178	55,65	11.137	6.265	56,25
Tabundung	10.296	5.565	54,05	10.348	5.670	54,79
Pinu Pahar	8.102	4.275	52,76	8.135	4.353	53,51
Pandawai	19.911	11.831	59,42	20.114	12.159	60,45
Umalulu	20.278	12.063	59,49	20.440	12.339	60,37
Rindi	11.356	6.204	54,63	11.394	6.303	55,32
Pahunga Lodu	15.056	8.262	54,88	15.153	8.482	55,98
Wulla Waijilu	8.876	5.201	58,60	8.929	5.311	59,48
Paberiwai	7.044	4.202	59,65	7.074	4.271	60,38
Karera	8.917	4.871	54,63	8.996	4.996	55,54
Kahaungu Eti	10.431	5.836	55,95	10.535	6.027	57,21
Matawai La Pawu	7.089	4.203	59,29	7.151	4.299	60,12
Kambera	36.139	20.133	55,71	36.427	20.661	56,72
Kambata Mapambuhang	4.478	2.557	57,10	4.509	2.614	57,97
Lewa Tidahu	8.211	4.500	54,80	8.277	4.635	56,00
Katala Hamu Lingu	4.624	2.545	55,04	4.652	2.612	56,15
Kanatang	12.385	6.994	56,47	12.471	7.185	57,61
Ngadu Ngala	5.963	3.323	55,73	5.992	3.368	56,21
Mahu	5.155	3.004	58,27	5.212	3.076	59,02
TOTAL	277.227	156.318	56,39	279.158	160.024	57,32
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025						

Dari Tabel 31 terlihat bahwa Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Umum (semua umur) berdasarkan DKB Semeter Pertama Tahun 2025 sebanyak 160.024 kutipan (57,32%) dari 279.158 jumlah penduduk. Ada peningkatan persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran walaupun masih sangat kecil sebesar 0,99 % dalam 6 (enam) bulan pertama di Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana penduduk yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 156.195 Kutipan (56,33%) dari 277.290 jiwa jumlah penduduk berdasarkan DKB Semester dua tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk Kabupaten Sumba Timur belum memiliki Akta kelahiran, karena masyarakat belum mengerti pentingnya memiliki Akta Kelahiran dan menganggap hanya anak-anak dan yang bekerja di bidang Pemerintahan, TNI, POLRI saja yang memerlukan Akta Kelahiran untuk kepentingan administrasi di tempat kerja. Terlihat bahwa persentase terbesar kepemilikan Akta Kelahiran umum di Kecamatan Pandawai sebanyak 12.159 kutipan (60,45%), disusul Kecamatan Paberiwai sebanyak 4.271 kutipan (60,38%), Kecamatan Matawai La Pawu sebanyak 4.299 kutipan (60,12%), sedangkan kepemilikan terendah ada pada Kecamatan Kecamatan Pinu Pahar sebanyak 4.353 kutipan (53,51%).

B. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Mengingat bahwa anak-anak juga perlu mendapatkan perlindungan secara hukum, walaupun mereka sudah memiliki Akta Kelahiran, maka pemerintah membuat terobosan dengan membuat program terkait identitas anak dengan nama Kartu Identitas Anak. Pembuatan Kartu identitas Anak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal pemberian identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara Indonesia sesuai amanat dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak ini khusus bagi anak berusia 0 - 17 kurang 1 (satu) hari dan belum menikah.

Adapun manfaat dari KIA ini, untuk memenuhi hak anak, agar anak mendapatkan perlindungan hukum, juga sebagai kelengkapan dalam hal pendaftaran di sekolah, perbankan, kebutuhan imigrasi, mendapatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun puskesmas, juga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak.

Setelah Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur melakukan terobosan dengan menciptakan Inovasi, maka ada perubahan atau hasil yang cukup mengembirakan, diaman dalam 6 (enam) bulan terakhir ini ada peningkatan cakupan kepemilikan KIA dari 50,61% (keadaan 31 Desember 2024) menjadi 52,82% (keadaan 30 Juni 2025) ada kenaikan sebesar 2,21%. Masih cukup jauh dari Target Nasional sebesar 60%. Untuk itu sangat

diharapkan dukungan dari Pemerintah dalam hal pendanaan untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah akan pentingnya memiliki KIA.

Data persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat dilihat dalam Tabel 32 di bawah ini.

Tabel 32 - Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)				
Kecamatan	Jumlah Anak	Belum Memiliki Kia	Sudah Memiliki Kia	Persentase Kepemilikan
Kota Waingapu	10.592	7.131	7.131	67,32
Haharu	2.065	1.036	1.036	50,17
Lewa	4.977	2.465	2.465	49,53
Nggaha Ori Angu	3.227	1.352	1.352	41,9
Tabundung	2.852	1.517	1.517	53,19
Pinu Pahar	2.481	1.246	1.246	50,22
Pandawai	6.139	3.672	3.672	59,81
Umalulu	6.043	3.344	3.344	55,34
Rindi	3.541	1.064	1.064	30,05
Pahunga Lodu	4.594	1.498	1.498	32,61
Wulla Waijilu	2.708	1.295	1.295	47,82
Paberiwai	2.439	1.287	1.152	47,23
Karera	2.710	1.573	1.137	41,96
Kahaungu Eti	3.324	1.887	1.437	43,23
Matawai La Pawu	2.166	1.094	1.072	49,49
Kambera	10.236	3.608	6.628	64,75
Kambata Mapambuhang	1.399	835	564	40,31
Lewa Tidahu	2.404	1.114	1.290	53,66
Katala Hamu Lingu	1.375	593	782	56,87
Kanatang	3.825	1.573	2.252	58,88
Ngadu Ngala	1.817	1.045	772	42,49
Mahu	1.918	869	1.049	54,69
TOTAL	82.832	39.077	43.755	52,82
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025				

Dari Tabel 32 berdasarkan hasil DKB Semester Pertama Tahun 2025, terlihat bahwa masih banyak anak usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Secara keseluruhan, persentase kepemilikan KIA sebesar 43.755 jiwa belum mencapai target nasional 60% dari jumlah anak-anak berusia 0-17 tahun kurang satu hari dan belum menikah sebesar 82,832 jiwa. Persentase kepemilikan tertinggi di Kecamatan Kota Waingapu sebesar 67,32 %, disusul Kecamatan Kambera sebesar 64,75 %, Kecamatan Pandawai sebesar 59,81 % dan yang

paling sedikit persentase kepemilikannya di Kecamatan Rindi sebesar 30,05 %, dibandingkan dengan hasil pelayanan tahun kemarin, terlihat ada peningkatan cakupan kepemilikan KIA.

C. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta Perkawinan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk pengakuan negara atas sebuah pernikahan yang dilaksanakan menurut agama/kepercayaan yang berlangsung atas suami dan isteri. Akta Perkawinan memberikan kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan memiliki peran penting dalam pembuktian legalitas dan kewajiban hukum dari ikatan perkawinan tersebut. Data kepemilikan Akta Perkawinan menurut kecamatan dapat dilihat pada *Tabel 33* di bawah ini.

Kecamatan	Jumlah Status Kawin	Belum Memiliki Akta Perkawinan	Memiliki Akta Perkawinan	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
Kota Waingapu	13.139	3.729	9.410	71,62
Haharu	2.435	1.597	838	34,41
Lewa	6.153	3.272	2.881	46,82
Nggaha Ori Angu	4.075	3.234	841	20,64
Tabundung	3.589	2.135	1.454	40,51
Pinu Pahar	3.029	1.559	1.470	48,53
Pandawai	6.867	3.555	3.312	48,23
Umalulu	6.936	3.185	3.751	54,08
Rindi	3.943	2.773	1.170	29,67
Pahunga Lodu	5.270	3.370	1.900	36,05
Wulla Waijilu	3.126	1.521	1.605	51,34
Paberiwai	2.265	1.302	963	42,52
Karera	3.260	1.567	1.693	51,93
Kahaungu Eti	3.768	2.349	1.419	37,66
Matawai La Pawu	2.369	1.139	1.230	51,92
Kambera	12.192	4.194	7.998	65,6
Kambata Mapambuhang	1.557	899	658	42,26
Lewa Tidahu	2.943	1.996	947	32,18
Katala Hamu Lingu	1.679	1.208	471	28,05
Kanatang	4.336	2.126	2.210	50,97
Ngadu Ngala	2.057	1.227	830	40,35
Mahu	1.809	1.353	456	25,21
TOTAL	96.797	49.290	47.507	49,08

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025

Pada Tabel 33, dari hasil Data Konsolidasi Bersih Semester Pertama Tahun 2025 melalui pengolahan SIAK terlihat dari 96.797 jiwa yang

berstatus kawin di Kabupaten Sumba Timur, ada 47.507 jiwa atau 49,08% yang memiliki Akta Perkawinan, jika dibandingkan dengan persentase kepemilikan Akta Perkawinan keadaan 31 Desember 2024 Semester Kedua, ada penambahan sebesar 1,1 persen yaitu 48,16%. Ada sebesar 49.290 jiwa atau 50,92% yang belum memiliki Akta Perkawinan. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan terbesar di Kecamatan Kota Waingapu sebesar 71,62 % dengan jumlah 9.410 jiwa, disusul Kecamatan Kambera sebesar 65,6 % dengan jumlah 7.998 jiwa dan disusul Kecamatan Umalulu sebesar 54,08 % dengan jumlah 3,751 jiwa sedangkan kepemilikan terkecil di Kecamatan Nggaha Ori Angu sebesar 20,64 % dengan jumlah 841 jiwa.

Data yang disajikan pada tabel tersebut bahwa masih rendah persentase kepemilikan Akta Perkawinan karena data yang disajikan adalah hasil pengolahan data dan penerbitan dokumen Akta Perkawinan dengan menggunakan Aplikasi SIAK baru dilaksanakan sejak Tahun 2013, sedangkan sebelum tahun 2013 pengolahan masih bersifat manual sehingga nomor registernya belum terekam dalam database kependudukan.

Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya (BS) karena ada kesalah pahaman dalam pengertian masyarakat bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta dan TNI/POLRI saja yang perlu mencatatkan perkawinannya (BS) untuk kebutuhan administrasi di tempat kerja, dan penduduk sudah melakukan perkawinan menurut agama/kepercayaan tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara hukum negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk itu diperlukan perhatian dan dukungan dari Pemerintah terkait pendanaan untuk mendukung program dan kegiatan Disdukcapil dalam rangka meningkatkan kepemilikan Akta Perkawinan bagi pasangan yang telah menikah secara sah menurut agama/kepercayaannya dengan melakukan pelayanan BS/Pencatatan Perkawinan secara massal dengan sistem jemput bola.

D. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

Setiap manusia memiliki identitas masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti halnya KTP Elektronik yang hanya dapat dimiliki oleh penduduk yang berusia 17 tahun keatas dan atau penduduk berusia di bawah 17 tahun yang sudah menikah.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Dengan memiliki KTP El, penduduk dapat dengan mudah mengurus semua

yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, Pendidikan, pekerjaan dan lain-lain

Tabel 34 - Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – EL)

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib Ktp-El	Jumlah Perekaman Ktp-El	Jumlah Pencetakan Ktp-El	Persentase Pencetakan Ktp-El
Kota Waingapu	37.201	26.649	26.052	25.948	99,60
Haharu	7.213	5.148	5.007	4.980	99,46
Lewa	17.798	12.831	12.509	12.456	99,58
Nggaha Ori Angu	11.137	7.915	7.707	7.672	99,55
Tabundung	10.348	7.502	7.290	7.256	99,53
Pinu Pahar	8.135	5.659	5.494	5.473	99,62
Pandawai	20.114	13.993	13.650	13.580	99,49
Umalulu	20.440	14.396	14.027	13.946	99,42
Rindi	11.394	7.857	7.648	7.585	99,18
Pahunga Lodu	15.153	10.571	10.243	10.168	99,27
Wulla Waijilu	8.929	6.235	6.050	6.029	99,65
Paberiwai	7.074	4.632	4.465	4.428	99,17
Karera	8.996	6.292	6.113	6.078	99,43
Kahaungu Eti	10.535	7.219	6.965	6.929	99,48
Matawai La Pawu	7.151	4.986	4.837	4.812	99,48
Kambera	36.427	26.229	25.618	25.516	99,60
Kambata Mapambuhang	4.509	3.110	3.015	3.000	99,50
Lewa Tidahu	8.277	5.882	5.688	5.659	99,49
Katala Hamu Lingu	4.652	3.276	3.196	3.181	99,53
Kanatang	12.471	8.661	8.420	8.368	99,38
Ngadu Ngala	5.992	4.180	4.059	4.039	99,51
Mahu	5.212	3.303	3.181	3.152	99,09
TOTAL	279.158	196.526	191.234	190.255	99,49
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025					

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah kepemilikan KTP Elektronik Semester Pertama tahun 2025 sudah mencapai 190.255 jiwa atau 99,49 %. Persentase kepemilikan KTP Elektronik terbesar ada pada Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan Kambera sebesar 99,60%, disusul Kecamatan Lewa sebesar 99,58% dan persentase kepemilikan terkecil di Kecamatan Mahu sebesar 99,09%.

E. Kepemilikan Kartu Keluarga

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga, yang merupakan salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu Keluarga

menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya.

Kartu Keluarga memuat identitas berupa nama, NIK, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat, status perkawinan, pekerjaan, Pendidikan, status hubungan dalam keluarga, agama, kewarganegaraan, nama orang tua, dokumen imigrasi.

Informasi dari Kartu Keluarga, sehingga diperoleh data dasar kependudukan serta besaran keluarga dalam wilayah administrasi pemerintahan tertentu seperti RT/RW, kelurahan/Desa/Kecamatan.

Data kepemilikan Kartu Keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Kecamatan	Kepala Keluarga	Belum Memiliki Kartu keluarga	Sudah Memiliki Kartu keluarga	Persentase Kepemilikan Kartu keluarga
Kota Waingapu	10.262	24	10.238	13,39
Haharu	2.100	11	2.089	2,73
Lewa	4.680	14	4.666	6,10
Nggaha Ori Angu	3.218	13	3.205	4,19
Tabundung	3.439	14	3.425	4,48
Pinu Pahar	2.298	12	2.286	2,99
Pandawai	5.265	15	5.250	6,87
Umalulu	5.430	13	5.417	7,09
Rindi	2.905	14	2.891	3,78
Pahunga Lodu	4.055	23	4.032	5,27
Wulla Waijilu	2.360	4	2.356	3,08
Paberiwai	1.991	5	1.986	2,60
Karera	2.452	10	2.442	3,19
Kahaungu Eti	2.840	10	2.830	3,70
Matawai La Pawu	1.984	10	1.974	2,58
Kambera	9.933	41	9.892	12,94
Kambata Mapambuhang	1.215	2	1.213	1,59
Lewa Tidahu	2.158	10	2.148	2,81
Katala Hamu Lingu	1.174	5	1.169	1,53
Kanatang	3.221	11	3.210	4,20
Ngadu Ngala	1.865	10	1.855	2,43
Mahu	1.595	10	1.585	2,07
TOTAL	76.440	281	76.159	99,63
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.				

Dari Tabel 35 berdasarkan DKB Semester Pertama Tahun 2025 terlihat bahwa persentase kepemilikan Kartu Keluarga tertinggi di Kecamatan Lewa yaitu sebanyak 4.485 KK (99,6%) , diikuti oleh Kecamatan Paberiwai sebanyak 1.931 KK (99,59%). Sedangkan kepemilikan terendah

di Kecamatan Lewa Tidahu sebanyak 2.083 KK (99,42%). Untuk persentase kepemilikan KK tingkat Kabupaten Sumba Timur sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2024 sebesar 100%. Belum mencapai 100% karena masih ada Kartu Keluarga yang belum dicetak. Hal ini kemungkinan karena ada Kepala Keluarga yang hanya mengajukan permohonan Kartu Keluarga secara online, tetapi belum cek hasilnya dan belum dicetak karena ketiadaan perangkat cetak (printer) atau disebabkan setelah pengajuan ke Dinas Dukcapil, yang bersangkutan belum sempat mengecek dokumennya sehingga Kartu Keluarganya belum dicetak serta belum melakukan update data.

F. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan aplikasi yang berisikan informasi penduduk yang disimpan dalam bentuk digital di perangkat smartphone atau gadget dan memiliki fitur untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dengan aktivasi IKD ini diharapkan dapat membuat pelayanan adminduk semakin mudah, cepat, efektif dan efisien.

Persyaratan pembuatan IKD adalah yang bersangkutan sudah pernah memiliki KTP atau sudah pernah melakukan perekaman biometrik dan mempunyai smartphone dan memiliki data atau jaringan internet.

Hasil rumusan saat Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 yang dilaksanakan di Batam pada tanggal 27 s/d 29 Februari 2024 dengan tema “Peran Identitas Kependudukan (IKD) Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik salah satunya adalah mempersiapkan IKD menjadi identitas digital sebagai Single Sign On (SSO) untuk implementasi 9 (Sembilan) aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, yaitu layanan Pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.

Tabel 36 - Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
KOTA WAINGAPU	1.340	1.614	2.954
HAHARU	156	157	313

Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
LEWA	300	343	643
NGGAHA ORI ANGU	165	171	336
TABUNDUNG	168	174	342
PINU PAHAR	108	113	221
PANDAWAI	365	421	786
UMALULU	356	440	796
RINDI	191	193	384
PAHUNGA LODU	188	325	513
WULLA WAIJILU	259	203	462
PABERIWAI	116	65	181
KARERA	138	129	267
KAHAUNGU ETI	216	182	398
MATAWAI LA PAWU	102	98	200
KAMBERA	1.006	1.323	2.329
KAMBATA MAPAMBUHANG	92	70	162
LEWA TIDAHU	145	120	265
KATALA HAMU LINGU	89	69	158
KANATANG	318	373	691
NGADU NGALA	108	92	200
MAHU	112	46	158
TOTAL	6.038	6.721	12.759
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025.			

• **Tujuan dari IKD ini adalah :**

1. Menghadirkan aksesibilitas dan efisiensi
Artinya dapat mengakses layanan pemerintahan dan swasta secara online dan untuk meningkatkan efisiensi proses admin istratif sehingga menghemat waktu dan biaya.
2. Memberi layanan yang setara
Layanan IKD merangkul konsep inklusivitas dengan menyediakan akses pelayanan yang setara bagi semua golongan untuk mendukung masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas atau kelompok etnis tertentu.

3. Membuka peluang baru
Artinya masyarakat dapat dengan mudah terlibat dalam transaksi online seperti membuka rekening bank atau mendapatkan layanan keuangan tanpa hambatan.
4. Menjaga privasi
Fokus utama dari IKD ini adalah untuk keamanan dan menjaga privasi pengguna
5. Akses layanan publik yang merata
Artinya dengan IKD ini maka masyarakat secara merata lebih mudah dalam mengakses dan memanfaatkan layanan publik.

• **Manfaat dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) :**

1. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat.
2. Mempermudah pelayanan administrasi penduduk
3. Meningkatkan efisiensi proses administratif
4. Mengurangi waktu dan biaya layanan

Untuk mendukung Pemerintah dalam hal meningkatkan pelayanan IKD, selain melakukan pelayanan aktivasi saat pelayanan di Dinas Dukcapil, Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur juga melakukan pelayanan IKD secara jemput bola dengan melakukan pelayanan di Kantor-kantor/ Dinas/ RSUD Umbu Rara/ Organisasi Wanita, Sekolah/ Unkriswina, Desa/Kelurahan/Kecamatan. Adapun jumlah yang sudah aktivasi IKD sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 belum mencapai separuh bagian dari jumlah kepemilikan KTP Elektronik, baru sebanyak 12.759.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2025 merupakan potret yang komprehensif mengenai dinamika kependudukan, sekaligus refleksi atas capaian kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Dokumen ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan arah dan pijakan strategis bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada kondisi demografis terkini.

Sumber data utama berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang dikelola secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta diperkuat dengan data dukung dari berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal seperti Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta BPJS Kesehatan Cabang Waingapu.

Profil ini diharapkan dapat menjadi landasan strategis sekaligus rujukan otoritatif bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan Kabupaten Sumba Timur yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

SARAN STRATEGIS

1. Peningkatan Validitas Data

- Mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan registrasi kependudukan secara tertib, sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

- Memperkokoh sinergi antara perangkat daerah, desa/kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait guna mewujudkan konsistensi serta sinkronisasi data kependudukan.

3. Optimalisasi Teknologi Informasi

- Memanfaatkan inovasi digital dan sistem integrasi data secara berkelanjutan untuk menghadirkan data yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- Memberikan penguatan kompetensi aparatur di bidang administrasi kependudukan, agar pengelolaan data semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

5. Pemanfaatan Data untuk Pembangunan Daerah

- Menjadikan data kependudukan sebagai basis utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdaya guna.

PENUTUP

Dengan komitmen, kerja sama, dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pemangku kepentingan, penyajian Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur ke depan akan semakin akurat, komprehensif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sumba Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.